

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**Deputi Bidang Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan

secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan yang lebih baik lagi bagi organisasi dan unit kerja di lingkungan BSN.

Jakarta, 27 Januari 2023

Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Dr. Zakiyah, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berikut disajikan pada tabel 1 capaian perjanjian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022:

TABEL 1 SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	60%	61,5%	103%
Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	75%	108%	144%
	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%	107%	124%
Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	50%	50 %	100%
Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di instansi pemerintah	2,2	2,2	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	6. Predikat akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	72 nilai (BB)	78,95	109,7%
Rata-rata capaian				113,5%

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, semua indikator kinerja tahun 2022 telah mencapai target, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113,5%. Capaian yang melebihi target perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan adanya Kebijakan pencadangan Anggaran atau *Automatic Adjustment* untuk memastikan setiap K/L membelanjakan anggaran hanya untuk belanja yang diperlukan, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya melakukan berbagai pendekatan, peningkatan metode, inovasi dan kolaborasi dengan mitra sehingga menghasilkan beragam kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja. Pemanfaatan ICT untuk memberikan *awareness* dan pembinaan mengenai penerapan Standar dan Penilaian kesesuaian SPK, penyempurnaan website TBT WTO, maupun pengembangan sistem dan pemberian SPPT SNI terus dikembangkan dan dioptimalkan. Demikian juga dengan kolaborasi program bersama mitra baik Kementerian, Lembaga, Bank Indonesia, BUMN, Perguruan Tinggi, EU-Arise Plus, dan Komunitas menjadikan capaian unit kerja di bawah Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melampaui dari target yang diharapkan.

Pada tahun 2022, sebagai perwujudan amanah Undang-Undang No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan peraturan turunannya, salah satunya mengenai Penyelenggaraan Perizinan tunggal, dimana pelaku UMK dengan Risiko Rendah diberi kemudahan berupa perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021), Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai legalitas, sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk melaksanakan peraturan ini, BSN menetapkan kebijakan dan program SNI Bina UMK untuk pembinaan penerapan SNI kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kategori usaha risiko rendah yang diharapkan dapat mempercepat transformasi UMK yang berdaya saing. UMK kategori risiko rendah yang mengajukan perizinan usaha melalui aplikasi *One Single Submission (OSS)* akan memperoleh NIB sekaligus tanda SNI Bina UMK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan penerapan

SNI (daring dan/atau luring) hingga memenuhi persyaratan SNI. Pembinaan telah dilakukan secara daring untuk 1171 UMK, dan video tutorial panduan penerapan SNI bagi UMK ditayangkan pada aplikasi bina UMK. Untuk mempercepat penerapan SNI bagi UMK risiko rendah, Deputi Bidang PSPK bekerjasama dengan Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan pelatihan penerapan SNI bagi 500 fasilitator/Pembina UMK dan workshop untuk 500 UMK di lima provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Selain itu, untuk memperluas akses pasar produk UMK berSNI ke tingkat global, Deputi PSPK bekerja sama dengan Toko Mutu Indonesia untuk mendisplay produk UMK berSNI pada aplikasi Mutu Indonesia dan mengadakan festival produk UMK yang dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan puncak Bulan Mutu Nasional 2022 di Palembang.

Pada tahun 2022 telah ditetapkan kebijakan skema penilaian kesesuaian penerapan SNI untuk sektor jasa pariwisata, tekstil, logam dan produk logam, dan lingkungan yang mengacu pada 424 SNI, dan melakukan kegiatan uji petik secara berkelanjutan terhadap produk-produk yang telah ber-SNI, penerapan SNI bidang jasa dan sistem - SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik - guna memastikan efektivitas penerapan SNI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Pelaksanaan uji petik berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di pasar. Berdasarkan hasil uji petik memperlihatkan tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI sebesar 61,5%, melebihi target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 60%.

Mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2014 pasal 46 ayat 3 bahwa persetujuan penggunaan tanda SNI diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha dan PP Nomor 34 tahun 2018 terkait dengan pembubuhan tanda SNI, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan tugas untuk memproses penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang diberikan kepada pelaku usaha, setelah produk dari pelaku usaha tersebut dinyatakan sudah memenuhi persyaratan sertifikasi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. Proses penerbitan SPPT SNI mengacu pada Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan dilakukan secara online, melalui aplikasi bangbeni.bsn.go.id., Selama tahun 2022, BSN telah menerbitkan sebanyak 500 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk.

Untuk mencapai Budaya Mutu memerlukan keterlibatan dan *engagement* dari seluruh stakeholder, Deputi PSPK melakukan kegiatan diseminasi dan promosi SPK secara luring maupun daring. Melaksanakan kegiatan Bulan Mutu Nasional 2022 dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Oktober dan November 2022. Selain itu diselenggarakan pemberian Penghargaan SNI Award 2022 kepada pelaku usaha penerap SNI yang memiliki Kinerja Unggul dan Berkelanjutan, melalui beberapa tahap penilaian mulai dari telaah desk evaluasi dan onsite evaluasi oleh evelautor, audisi BOD organisasi dan penetapan keputusan oleh Dewan Juri yang melibatkan seluruh pakar dibidangnya. Untuk membangun komunikasi antara peserta SNI award dan menyebarkan perkembangan pengetahuan di bidang standar dan implementasinya, Deputi Bidang PSPK juga menerbitkan *News Letter* SNI Award secara rutin.

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja internal antara lain:

- Deputi Deputi Bidang Pengembangan Standar dan Deputi Bidang Akreditasi dalam penyusunan skema penilaian kesesuaian untuk SNI sukarela, kebijakan penunjukan LPK, fasilitasi penyusunan regulasi teknis, pemutakhiran daftar SNI wajib, dan penetapan masa transisi SNI.
- Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Akreditasi, Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informas (HKLI) , Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum (SDMOH), Pusat Data dan Informasi SPK (PUSDATIN), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pusbang SDM) dalam keikutsertaan personil sebagai perwakilan tim penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK (multilateral, Regional, Bilateral dan NB/EP TBT WTO).
- Deputi bidang Pengembangan Standar dan Biro HKLI mendukung penyediaan SNI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha dan organisasi dalam penerapan standar SNI dan PK,
- Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Akreditasi dan Deputi Bidang SNSU, serta seluruh unit Eselon 2 di Lingkungan BSN dalam kegiatan diseminasi dan promosi standar dan penilaian kesesuaian, Bulan Mutu Nasional, Penghargaan SNI Award, seminar dan webinar.

- Sestama dan Seluruh unit eselon 2 di lingkup kesestamaan dan Inspektorat, dalam memberi dukungan untuk penetapan kebijakan bidang PSPK, penyusunan Rencana strategis dan rencana tahunan dan penerapannya, pengembangan kompetensi SDM, penerapan sistem manajemen terintegrasi, penerapan Reformasi Birokrasi, serta penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan seperti sarana prasarana , keuangan, dan ICT sehingga tercapainya Sasaran Deputi PSPK dengan Kinerja yang memuaskan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	11
I.1 Latar Belakang.....	11
I.2 Maksud dan Tujuan	11
I.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	12
I.4 Sumber Daya Manusia.....	13
I.5 Peran Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
II.1 Perencanaan Strategis.....	22
II.1.1 Visi Dan Misi.....	22
II.1.2 Tujuan Dan Sasaran	24
II.2 Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
III.1 Capaian Kinerja	30
III.2 Realisasi Anggaran	104
BAB IV PENUTUP	107
LAMPIRAN	109
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	109
Data Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2022.....	111
Progres Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2022	124
Penetapan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2023	128
Tabel Rekomendasi Pada Perundingan/Kesepakatan Internasional Bidang SPK	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian	12
Gambar 1.2 Komposisi Tim Evaluator SNI Award 2022.....	15
Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Uji Petik SNI Barang Tahun 2022... ..	34
Gambar 3.2 Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No. 7 Tahun 2020	42
Gambar 3.3 Progres PNRT dan Regulasi Yang Ditetapkan Periode 2015-2022	43
Gambar 3.4 Tahapan Penetapan Masa Transisi SNI.....	46
Gambar 3.5 Grafik Rasio Daya Dukung LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah.....	56
Gambar 3.6 Sebaran Wilayah Fasilitas LPK Tahun 2022.....	57
Gambar 3.7 Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2012-2022	63
Gambar 3.8 Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Dalam Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan	64
Gambar 3.9 Struktur Komnas dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	64
Gambar 3.10 Sidang IEU-Cepa Ke-12	69
Gambar 3.11 Sidang I-UAE Cepa (<i>Hybrid</i>).....	69
Gambar 3.12 Jumlah Organisasi Penerima SNI Award Dengan Peringkat Penghargaan	87
Gambar 3.13 Pertumbuhan Jumlah Organisasi Penerap SNI dari Tahun 2016-2022 ..	89
Gambar 3.14 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi UMKM dan Organisasi/ Industri Sampai Dengan Tahun 2022	91
Gambar 3.15 Total Sebaran UMKM Per-Provinsi yang Tersertifikasi SNI.....	91
Gambar 3.16 Peta Sebaran Fasilitas LPK Th 2022	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022	3
Tabel 1.1 Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel 1.2 Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 1.3 Personel ASN Kedeputusan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Rentang Usia	14
Tabel 1.4 Potensi dan Permasalahan di Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK 2020-2024.....	25
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022	26
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1	32
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 2.....	35
Tabel 3.4 Daftar PBSN Skema Penerapan SNI Yang Ditetapkan Tahun 2022	36
Tabel 3.5 Daftar PBSN Skema Penerapan SNI Dalam Proses Penetapan	37
Tabel 3.6 Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK	38
Tabel 3.7 Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK	41
Tabel 3.8 Rencana PNRT 2023	44
Tabel 3.9 Ketersediaan RIA dan Progres PNRT 2023.....	45
Tabel 3.10 Keputusan Kepala BSN Tentang Penetapan Masa Transisi SNI Tahun 2022	47
Tabel 3.11 Daftar Fasilitas Kepada Umk Dalam Penerapan Dan Sertifikasi SNI	49
Tabel 3.12 Daftar Fasilitas Kepada Organisasi dan Industri Dalam Penerapan SNI ...	53
Tabel 3.13 LPK Binaan BSN yang Telah Selesai Proses Fasilitas Tahun 2022.....	57
Tabel 3.14 Lembaga Sertifikasi/Lembaga Inspeksi yang Difasilitasi	58
Tabel 3.15 Daftar LPK Yang Mengikuti Skema JSC EEE MRA.....	60
Tabel 3.16 Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	63
Tabel 3.17 Rangkaian Pertemuan Sidang TBT WTO Tahun 2022.....	65
Tabel 3.18 Narasumber Indonesia Dalam Pertemuan Thematic Session Sidang TBT WTO	65
Tabel 3.19 STC yang diajukan Oleh Indonesia Dalam Sidang TBT WTO	67

Tabel 3.20	STC yang Diajukan Kepada Indonesia Dalam Sidang TBT WTO	67
Tabel 3.21	Pertemuan Bilateral Indonesia Dalam Sidang TBT WTO	68
Tabel 3.22	Proposal yang Diterima Dalam Eccb lefta Cepa.....	71
Tabel 3.23	Program <i>Trade Policy Review</i> (TPR) Tahun 2022	72
Tabel 3.24	Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPRS)	73
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran 3.....	87
Tabel 3.26	Jumlah SNI yang Diterapkan.....	88
Tabel 3.27	Jumlah Organisasi Penerap SNI Sesuai Dengan Skema Akreditasi KAN....	90
Tabel 3.28	Laboratorium yang Difasilitasi	92
Tabel 3.29	Lembaga Sertifikasi/Lembaga Inspeksi yang Difasilitasi	93
Tabel 3.30	Ruang Lingkup Listing LPK Indonesia	95
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran 4.....	97
Tabel 3.32	Elemen dan Sub Elemen Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK.....	98
Tabel 3.33	Lokus Organisasi Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK.....	99
Tabel 3.34	Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK.....	102
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran 5.....	103
Tabel 3.36	Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian TA 2022	105

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Tahun 2022.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Struktur Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 (delapan puluh) orang, dengan rincian sesuai tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1 PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Uraian	Jenjang Pendidikan					Jumlah Orang
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1.	Deputi PSPK		-	-		1	1
2.	Direktorat SPSPK		-	24	13	1	38
3.	Direktorat PPSPK	1	1	28	11	-	41
	Jumlah	1	1	52	24	2	80

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 terlihat bahwa Deputi PSPK mempunyai sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 52 orang (65%) dan S2 sebanyak 24 orang (30%) dan jenjang S3 sebanyak 2 orang (2,5%) dan 2,5% sedang menyelesaikan Pendidikan ke jenjang S1. Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Deputi PSPK terus dikembangkan tidak hanya dari tingkat pendidikan formal, namun juga soft kompetensi maupun kemampuan teknis lainnya yang menunjang pekerjaan di masing-masing unit kerja.

Sedangkan Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang memperlihatkan keseimbangan.

TABEL 1.2 PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Deputi PSPK	-	1	1
2.	Direktorat SPSPK	16	22	38
3.	Direktorat PPSPK	23	18	41
	Jumlah	41	42	80

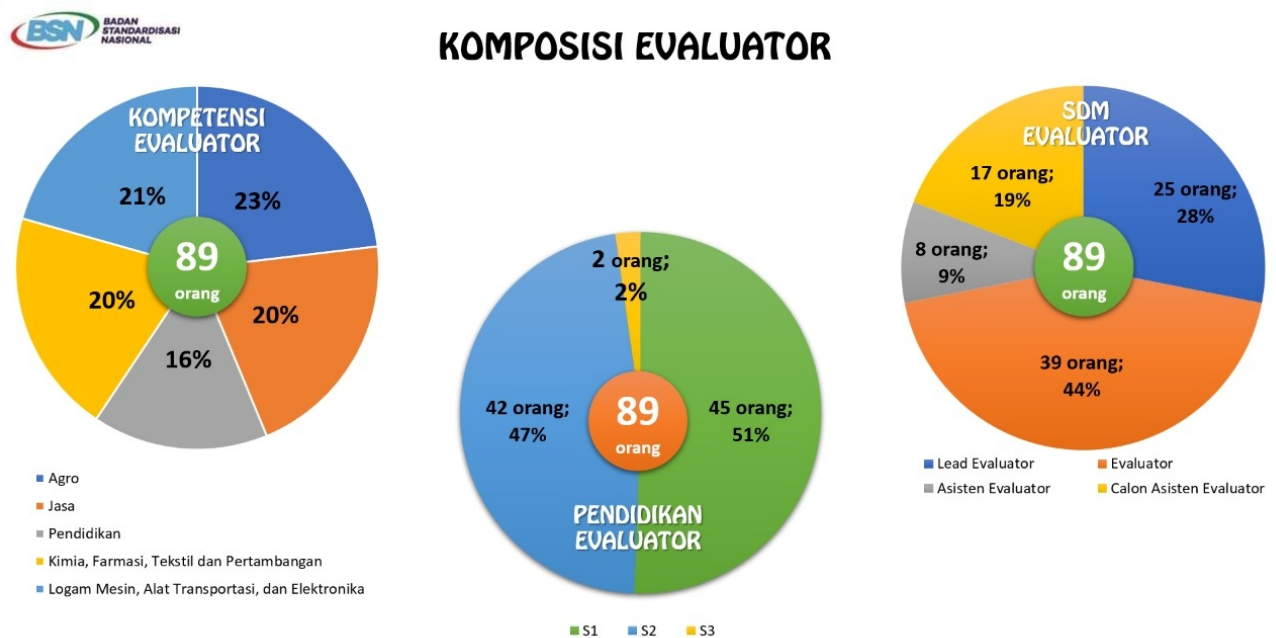
Selain itu, Tabel 1.3 menunjukkan ketersediaan pegawai di Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan rentang usia. Terlihat bahwa SDM di lingkungan PSPK didominasi oleh SDM dengan rentang usia 36-40 tahun.

TABEL 1.3 PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN RENTANG USIA

No	Rentang Usia PNS	Jumlah
1.	20 – 25	1
2.	26 – 30	18
3.	31 – 35	18
4.	36 – 40	28
5.	41 – 45	7
6.	46 – 50	4
7.	51 – 55	1
8.	>55	3
	TOTAL	80

Selain SDM internal, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga didukung oleh stakeholder sebagai partner/mitra dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian dimana kontribusi mereka sangat besar. Mitra tersebut terdiri dari:

1. Anggota Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional yang melibatkan 15 institusi
2. Dewan Juri SNI Award sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur industri, regulator, akademisi, media dan dari lembaga penilaian kesesuaian
3. Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) yang terdiri dari 14 Kelompok Kerja dengan melibatkan 12 institusi
4. Kelompok Kerja ISO COPOLCO yang terdiri dari 4 institusi baik dari pemerintah, profesional, maupun NGO yang bergerak di bidang perlindungan konsumen
5. Evaluator SNI Award sebanyak 69 orang yang terdiri dari Calon Asisten Evaluator, Asisten Evaluator, Evaluator dan Lead Evaluator dengan komposisi masing-masing seperti dalam Gambar 1.2



GAMBAR 1. 2 KOMPOSISI TIM EVALUATOR SNI AWARD 2022

6. Pembina UMKM dan LPK yang tersebar di pusat maupun daerah
7. Verifikator tata Kelola SPK melibatkan 15 institusi
8. Koordinator Sektor lingkup ACCSQ melibatkan 6 institusi
9. Keanggotaan kelompok kerja pengelola penilaian kesesuaian

I.5 PERAN STRATEGIS

Sejalan dengan perkembangan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan yang sehat dan transparan serta melindungi kepentingan umum. Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan di bidang standardisasi nasional.

BSN mempunyai peran strategis mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam pembahasan isu strategis terkait standardisasi dalam Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) tahun 2020. Sesuai amanah UUCK ini, pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMK. Untuk memberikan kemudahan berusaha dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah telah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam peraturan perizinan berusaha berbasis risiko atau *Risk Based Approach* (RBA) ini, SNI menjadi salah satu isu strategis khususnya dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha mikro kecil dengan tingkat risiko rendah, berlaku juga sebagai SNI.

Dengan ketentuan tersebut, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam Pembinaan UMK dalam konteks perizinan tunggal melalui Kebijakan SNI Bina UMK. Lebih lanjut kebijakan ini diturunkan kedalam program dan kegiatan diseminasi, edukasi, dan pembimbingan penerapan SNI, serta pengembangan skema sertifikasi khusus UMK risiko rendah secara terintegrasi. Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan ini, BSN telah meluncurkan aplikasi SNI Bina UMK yang dapat menjadi sarana kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah, untuk melakukan pendampingan penerapan SNI sampai fasilitasi sertifikasi SNI termasuk dapat digunakan oleh UMK secara mandiri untuk mempelajari modul penerapan SNI yang terdapat dalam aplikasi tersebut guna memenuhi persyaratan SNI. Dengan adanya kebijakan dan program terintegrasi ini diharapkan mampu mempercepat UMK naik kelas dan berdaya saing.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema Penilaian Kesesuaian (PK) sesuai dengan prinsip penilaian kesesuaian yang diakui global. Skema PK ini menjadi acuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk menjalankan kegiatan sertifikasi dan bisa dijadikan referensi bagi regulator saat menetapkan regulasi teknis. Agar SPK dipahami dan atau diterapkan, Deputi bidang PSPK melaksanakan diseminasi Standar SNI yang ditetapkan kepada stakeholder baik melalui kegiatan tatap muka dan daring dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan fasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi. Beberapa Pelaku UMKM yang telah difasilitasi BSN telah sukses masuk ke pasar ekspor. Untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan daerah dan meningkatkan ketersediaan LPK di berbagai wilayah, Deputi PSPK juga melakukan pemetaan dukungan LPK dan memberi fasilitasi pembinaan kepada LPK. Dengan semakin banyaknya LPK untuk mendukung penerapan SNI di berbagai wilayah, akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses penilaian kesesuaian terhadap produk dan jasanya.

Untuk memastikan pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan/ketentuan yang berlaku dan melihat efektivitas penerapan SNI, BSN melakukan uji petik produk bertanda SNI terhadap barang yang beredar dilapangan, uji petik penerapan SNI sektor jasa dan sektor sistem manajemen yang telah disertifikasi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi KAN. Atas dasar hasil uji petik, BSN menyampaikan rekomendasi kepada *stakeholder* terkait untuk ditindaklanjuti dan menjadi salah satu input bahan evaluasi *stakeholder* untuk melihat kontribusi mereka dalam menunjang tingkat efektifitas penerapan SNI yang berkelanjutan.

Peran strategis Deputi PSPK dalam forum internasional adalah melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite *Technical Barrier to Trade - TBT* WTO sesuai tugas BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point* sebagaimana tertuang dalam PP 34 Tahun 2018. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner memberikan masukan terhadap rancangan regulasi teknis dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan tersebut. Selain hal tersebut, Deputi PSPK menjadi Ketua Komite Nasional Hambatan Teknis

Perdagangan yang beranggotakan semua Kementerian dan Lembaga pemerintah yang terkait untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan memastikan bahwa kebijakan yg ditetapkan oleh Indonesia efektif dalam memfasilitasi perdagangan. Selain itu juga memperkuat pentingnya *Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure* (STRACAP) dalam perundingan bilateral dan global.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung **pelaksanaan fungsi BSN.**

TABEL 1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN DI ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Tersedianya SNI sebagai persyaratan sesuai kepentingan nasional dan selaras dengan standar internasional	1.1. Efektifitas penerapan SNI belum optimal. Terlihat dari adanya beberapa produk bertanda SNI yang beredar di pasar yang tidak konsisten memenuhi persyaratan SNI	1.1.1 Memperkuat forum KKPRs untuk peningkatan efektivitas penerapan SNI dan pemantauannya 1.1.2 Penguatan komunikasi dengan KAN untuk pemeliharaan <i>building trust</i> kegiatan PK
	1.2 Penerapan SNI untuk mendukung komitmen perubahan iklim masih rendah	1.2.1 Program diseminasi dan fasilitasi penerapan SNI mendukung komitmen perubahan iklim dimasukkan dalam kegiatan 2023
2. Ditetapkannya PP 5 tahun 2021, PP 7 tahun 2021, dan kebijakan OSS memperkuat pentingnya penerapan SNI	2.1 Aturan penerapan SNI belum ditetapkan untuk mendukung implementasi perizinan tunggal untuk risiko rendah sebagaimana diamankan PP 5/2021 dan PP 7 tahun 2021	2.1.1 Pengembangan kebijakan /sistem /program pembinaan dan penerapan SNI UMK risiko rendah - SNI Bina UMK 2.1.2 pengembangan aplikasi layanan SPP SNI berbasis OSS

<p>3. Kolaborasi antar K/L/D dalam Pembinaan UMK melalui aplikasi SNI Bina UMK sebagai amanah UU Cipta Kerja, PP 5/2021 dan PP 7/2021.</p>	<p>3.1 anggaran pembinaan penerapan SNI untuk UMK yang telah memperoleh NIB dan SNI bina UMK belum memadai.</p>	<p>3.1.1 Perlu pendekatan untuk pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) di Kementerian untuk pembinaan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI di daerah</p>
	<p>3.2 Jumlah Fasilitator penerapan SNI Bina UMK belum memadai</p>	<p>3.2.1 Optimalisasi Kerjasama dengan dengan K/L/Pemda</p>
<p>4. Meningkatnya minat masyarakat terhadap SPK dan penerapannya</p>	<p>4.1. Terbatasnya saluran komunikasi yang kontinu di dalam masyarakat</p>	<p>4.1.1 Optimalisasi Kantor KLT sebagai rumah mutu/SPK bagi masyarakat 4.1.2. Membangun sinergi dengan perangkat pemda/desa dengan untuk mengkomunikasi peran dan signifikansi SPK dalam aktivitas masyarakat (pendekatan jemput bola) 4.1.3. Pengembangan model komunikasi SPK berbasis sosiologi</p>
<p>5. Meningkatnya permintaan penerapan dan sertifikasi SNI oleh pelaku usaha</p>	<p>5.1 Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI</p>	<p>5.1.1 Pengembangan e-panduan penerapan SNI dan program pendampingan UMKM</p>
	<p>5.2. Masih terbatasnya Pembina/fasilitator penerapan SNI</p>	<p>5.2.1 <i>Capacity building</i> bagi Pembina/fasilitator UMKM 5.2.2 Pengembangan jejaring pembina UMKM</p>
	<p>3 Akses pasar produk tersertifikasi SNI masih rendah</p>	<p>5.3.1 Penguatan keberadaan Etalase Digital Produk UMKM ber SNI "Toko Mutu Indonesia". 5.3.2 Pemanfaatan akses Kerjasama bilateral</p>
<p>6. Adanya Kebijakan dan kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan pada BUMN</p>	<p>6.1 Kolaborasi dengan beberapa BUMN baru bersifat parsial, belum massif. Belum ada landasan kebijakan Kementerian</p>	<p>6.1.1 Pendekatan kepada Kementerian BUMN untuk mengeluarkan kebijakan bagi BUMN dalam program TJSJ untuk memfasilitasi</p>

	BUMN untuk memperkuat daya saing UMKM melalui penerapan SNI dalam kegiatan TJSL	penerapan SNI pada UMKM binaannya
7. Meningkatnya jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN untuk mendukung kegiatan penerapan standar	7.1 Ruang lingkup akreditasi belum sepenuhnya mendukung produk daerah dan pertumbuhan jenis usaha	7.1.1 Penguatan Kerjasama dengan pemerintah daerah & perguruan tinggi dalam pengembangan LPK di daerah. 7.1.2 Penunjukkan LPK yang terakreditasi untuk ruang lingkup akreditasi SNI voluntary.
	7.2 Skema sertifikasi produk begitu beragam,	7.2.1 Akselerasi Penyusunan dan penetapan skema sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela, bekerjasama dengan LPK, pelaku usaha, dan ahli sesuai bidang.
8. BSN selaku <i>notification body and enquiry</i> TBT WTO sehingga kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi	8.1 Rendahnya pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator	8.1.1 Audiensi ke Regulator mendorong pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator dan pemanfaatan forum <i>high policy dialogue</i> (<i>national task force for NTMS</i>)
	8.2 Regulasi yang dinotifikasi sering mendapat <i>concern</i> dari negara anggota lain	8.2.1 Pemastian PBSN 7 dan PBSN 8 tahun 2020 dan pemenuhan perjanjian TBT yg akan dinotifikasi
	8.3 Rendahnya <i>awareness</i> dan partisipasi stakeholder (industri) dalam mengakses rancangan regulasi teknis negara lain / nasional	8.3.1 Penyempurnaan website TBT WTO 8.3.2 Sosialisasi ePing ke industri untuk optimalisasi peran <i>Enquiry Point</i> 8.3.3 Dialog secara intensif dan FGD rancangan RT dengan KADIN, Asosiasi asosiasi, EU Arise +.

	8.4 Kurangnya penyediaan data dalam memperjuangkan posisi nasional termasuk isu lingkungan dan kesehatan	8.4.1 Penguatan fungsi Analisis Standardisasi BSN dan kerjasama <i>research</i> untuk mendukung posisi Indonesia termasuk penanganan <i>dispute</i>
9. Meningkatnya pemanfaatan SPK dan GRP dalam penyusunan Regulasi teknis	9.1 Kurangnya pemahaman regulator dalam penyusunan analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan PNRT	9.1.1 <i>Capacity building</i> penyusunan analisis dampak regulasi teknis, skema penilaian kesesuaian dan regulasi teknis berbasis SPK
	9.2. Dukungan ketersediaan LPK yang terbatas dalam hal pengujian	9.2.1 Kolaborasi program Penguatan kompetensi LPK guna mendukung penerapan regulasi teknis
	9.3 Masih banyaknya kebingungan stakeholder terkait informasi status penerapan SNI dan ketentuan pemberlakuan SNI wajib	9.3.1 Penyusunan FAQ informasi penerapan SPK bagi stakeholder
10. Penguatan Peran (STRACAP) dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra (bilateral, regional, multilateral)	10.1. Masih terbatasnya kompetensi SDM SPK dalam penyiapan dan analisis data untuk memperkuat posisi Indonesia	10.1.1 Peningkatan <i>capacity building</i> SDM SPK terkait perjanjian perdagangan dan aturan terkait lainnya
	10.2 Lemahnya komunikasi data dan informasi penunjang antar unit di BSN maupun lintas K/L dalam perumusan posisi DELRI bidang SPK	10.2.1 Pemanfaatan ICT dalam penyiapan, pengelolaan data dan informasi perjanjian perdagangan 10.2.2 Pembentukan Tim Internal BSN Penanganan Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang SPK

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 VISI DAN MISI

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan di atas, maka Deputi PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. Memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;
4. Memperkuat peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
7. Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi ke deputian.

II.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sampai dengan 2024 sebesar 20%. Ratio standardisasi produk Indonesia, dengan target sampai dengan 2024 sebesar 20%.

Dengan tujuan BSN tersebut kemudian diturunkan ke tujuan Deputy Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN DEPUTI BIDANG PSPK 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI dengan target sampai dengan 2024 sebesar 70%
Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah dengan target sampai dengan 2024 sebesar 2,6.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024, Indikator

Kinerja Utama BSN dan Renstra Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Tahun 2021-2024:

1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia
2. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI
3. Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif
4. Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L
5. Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal
6. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional
7. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target (Tabel 2.2).

TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	60%
	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	75%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%
Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	50%
Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di instansi pemerintah	2,2 rata-rata tingkat maturitas
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	6. Predikat akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	72 nilai (BB)

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1) Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (3561.ABB) dengan Rincian Output (RO) antara lain:
 - 1) Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.ABB.001)
 - 2) Perundingan Regional Bidang SPK (3561.ABB.002)
 - 3) Implementasi Kesepakatan Internasional (3561.ABB.003)
 - 4) Perundingan Bilateral (3561.ABB.004)

- b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.ABK) dengan Rincian Output (RO):
 - 1) Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001)
 - 2) Harmonisasi regulasi berbasis SPK (3561.ABK.002)
 - 3) Pengendalian Penerapan SNI (3561.ABK.003)
- c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Sidang Komite TBT WTO (3561.AEB.001)
- d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik Lainnya (3561.BAH) dengan Rincian Output (RO) antara lain Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001)
- e. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (3561.FAI) dengan Rincian Output (RO): Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.FAI.001)

2) Kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558) dengan yang terdiri dari KRO dan RO, sebagai berikut

- a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3558.AEB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Sidang ISO DEVCO (3558.AEB.001)
- b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Sosialisasi dan Desiminasi (3558.AEF) dengan Rincian Output (RO) yaitu Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558.AEF.001)
- c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3558.BDB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Kesekretariatan DB JSCEEE (3558.BDB.001)
- d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3558.BDD) dengan Rincian Output (RO) yaitu Bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat (3558.BDD.001)
- e. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (3558.BDH) dengan Rincian Output (RO) yaitu Bimbingan teknis kepada badan usaha (3558.BDH.001)
- f. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Sosialisasi dan Diseminasi (3558.PEF) dengan Rincian Output (RO) yaitu Sosialisasi Kepada Penerap SNI (3558.PEF.001)
- g. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik Lainnya (3558.QAH) dengan rincian RO:
 - 1) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya (3558.QAH.001)

- 2) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat (3558.QAH.003)
 - 3) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau (3558.QAH.005)
 - 4) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang (3558.QAH.007)
 - 5) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar (3558.QAH.009)
- h. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3558.QDB) dengan RO Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (3558.QDB.001)
- i. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (3558.QDG) dengan RO Bimbingan teknis kepada UMKM (3558.QDG.001)



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

TABEL 3. 1 PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESesuaIAN TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	1. Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	60%	61,5%	103%
Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	2. Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	75%	108%	144%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%	107%	124%
Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	4. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	50%	50%	100%
Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	5. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di instansi pemerintah	2,2 rata-rata tingkat maturitas	2,2	100%
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	6. Predikat akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	72 nilai (BB)	78,95	109,7%
Rata-rata capaian				113,5%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	64,3	60	61,5	103	70	88%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 103%, dengan target 60% dan tercapai 61,5%. Capaian ini berdasarkan kegiatan uji petik. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha sesuai SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.
4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro ditunjuk olehnya.

Pada tahun 2022, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia.

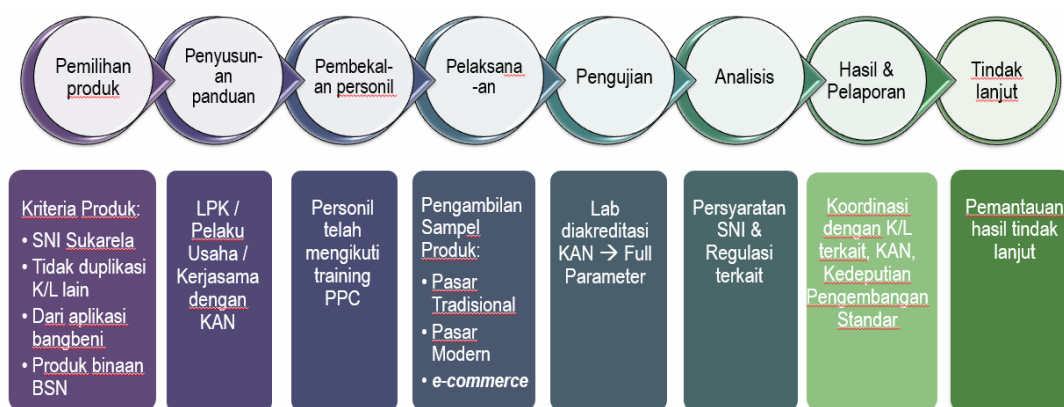
Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik dilaksanakan pada Januari tahun 2022 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem.

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik dari Badan Standardisasi Nasional. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan kegiatan monitoring dan uji petik untuk produk beredar di masyarakat baik yang dijual di *e-commerce* maupun di pasar yang selanjutnya akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN.

Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2022 di 19 kota dan 2 kabupaten di Indonesia, dengan total pengambilan sampel sebanyak 83 merek. Pada tahun 2022 disebabkan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia, selain melakukan uji petik secara langsung di pasar tradisional maupun pasar modern, uji petik juga dilakukan secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan *e-commerce*. Pengambilan sampel produk uji petik secara langsung dilakukan di Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Makassar, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banjar. Sedangkan pembelian secara daring dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Sidoarjo.

Semua hasil uji petik 2022 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya hasil uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar 3.1



GAMBAR 3.1 TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN UJI PETIK SNI BARANG TAHUN 2022

SASARAN 2**Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif****TABEL 3. 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% (*)	Target	% capaian
Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	%	97	75	108	144	90	100
Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	88	86	107	124	95	100
Jumlah Rata-rata			80,5	107,5	134	92,5	100

Sasaran 2 yaitu **memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian secara efektif**, sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

- 1) Indikator 1: Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder. Capaian indikator ini sebesar 144% atau dari target sebesar 75% telah mencapai realisasi sebesar 108%.
- 2) Indikator 2: Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders. Capaian Indikator ini sebesar 124% atau dari target sebesar 86% telah mencapai realisasi sebesar 107%.

Adapun kebijakan di lingkup Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan Kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder.

2.1**Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder**

Kebijakan penerapan SPK ini ditetapkan BSN dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) BSN, Keputusan Kepala BSN dan Keputusan Deputi PSPK. Pada Tahun 2022, Deputi Bidang PSPK telah menetapkan kebijakan SPK yang menjadi acuan stakeholder

sebanyak 74 kebijakan (108%), melebihi target yang ditetapkan 56 kebijakan (108%). Dengan demikian Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder mencapai 144%.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan telah menjadi acuan stakeholder adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Skema Penilaian Kesesuaian

Pada tahun 2022 telah dikembangkan 26 skema untuk 178 SNI. Dari 26 skema yang telah dikembangkan, 14 skema untuk 54 SNI (Tabel 3.4) telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BSN (PBSN) dan dapat digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pelaku Usaha, serta menjadi acuan dalam lingkup akreditasi Lembaga Penilaian kesesuaian. Sedangkan 9 skema untuk 118 SNI sudah melalui proses harmonisasi oleh kementerian Hukum dan HAM, dan menunggu persetujuan Presiden. Sejumlah 3 skema untuk 6 SNI dalam proses pembahasan lebih lanjut dan proses *public hearing* (tabel 3.5).

TABEL 3. 4 DAFTAR PBSN SKEMA PENERAPAN SNI YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No.	PBSN	Tentang	Jumlah Skema	Jumlah SNI
1	PBSN 7/2022	Perubahan ketiga atas PBSN 1 Tahun 2019 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor karet dan plastic	1	6
2	PBSN 5/2022	Perubahan Kedua atas PBSN 6/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor elektroteknika, telekomunikasi dan produk optic	7	15
3	PBSN 6/2022	Perubahan atas PBSN 15/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor peralatan permesinan	2	5
4	PBSN 4/2022	Perubahan atas PBSN 4/2022 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4	28
	Jumlah		14	54

TABEL 3.5 DAFTAR PBSN SKEMA PENERAPAN SNI DALAM PROSES HARMONISASI KEMENHUM-HAM

Proses	Judul PBSN	Jumlah Skema	Jumlah SNI
Persetujuan Presiden	RPBSN Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor Tekstil dan Produk Pakaian	6	80
Persetujuan Presiden	RPBN Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor Pertanian dan Perkebunan (Skema IndoGAP Tanaman Pangan)	1	20
Persetujuan Presiden	RPBSN Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor Jasa (Pariwisata)	1	5
Persetujuan Presiden	RPBSN Skema Sertifikasi Ekolabel	1	13
Public Hearing	Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor Elektronika	1	4
Pembahasan	Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor sektor telekomunikasi	1	1
Pembahasan	Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI untuk Sektor Jasa	1	1
	Jumlah	12	124

b. Kebijakan Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Telah ditetapkan kebijakan penunjukkan LPK, yaitu sebanyak 15 (lima belas) Surat Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Kebijakan ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, bagi SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Berikut daftar SK Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel 3.6. Pada tahun 2022 terdapat 3 LS Pro yang dicabut penunjukannya dikarenakan dalam dua tahun tidak terakreditasi KAN (Tabel 3.7).

TABEL 3.6

DAFTAR SK KEPALA BSN TENTANG PENUNJUKKAN LPK

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
1.	LSPro Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" (LSPr-077-IDN)	SNI 8203:2017, Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industry	SK No. 3/KEP/BSN/1/2022 tgl 19 Januari 2022	s/d 18 Januari 2024	
2.	LSPro Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP) Surabaya (LSPr-056-IDN)	SNI 8646:2018, Kerupuk ikan, udang dan moluska siap makan	SK No. 43/KEP/BSN/3/2022 tgl 7 Maret 2022	s/d 6 Maret 2024	
3.	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 8986:2021, Baja karbon batangan canai panas untuk structural mesin	SK No. 44/KEP/BSN/3/2022 tgl 7 Maret 2022	s/d 6 Maret 2024	Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
4.	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN)	SNI 8361:2017, Pakaian dalam Wanita	SK No. 132/KEP/BSN/5/2022 tgl 30 Mei 2022	s/d 29 Mei 2024	

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
5.	LSPro Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Alsintan) (LSPr- 027-IDN)	SNI 8030:2014, Mesin pamarut multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol SNI 8031:2019, Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji SNI 8886:2020, Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji	SK No. 193/KEP/BSN/7/2022 tgl 4 Juli 2022	s/d 3 Juli 2024	
6.	LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian (LSPr- 004-IDN)	SNI 03-3046-1992, Kawat bronjong dan bronjong berlapis PVC (Polivinil Chlorida)	SK No. 245/KEP/BSN/8/2022 tgl 5 Agustus 2022	s/d 4 Agustus 2024	
7.	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN)	SNI 8896:2020, Keju mozzarella	SK No. 253/KEP/BSN/8/2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	
8.	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 01-3709-1995, Rempah-rempah bubuk	SK No. 251/KEP/BSN/8/2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	
9.	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN)	SNI 6688:2011, Tekstil – Kain rajut untuk pakaian olahraga	SK No. 252/KEP/BSN/8/2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
10.	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 07-1579-1989, Baja karbon dan baja panduan Batangan untuk pengerjaan dingin	SK No. 240A/KEP/BSN/8/2022 tgl 2 Agustus 2022	s/d 1 Agustus 2024	Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
11.	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim, Kementerian Perindustrian (LSPr-018-IDN)	SNI 3729:2008, Tepung sagu	SK No. 273/KEP/BSN/8/2022 tgl 24 Agustus 2022	s/d 23 Agustus 2024	
12.	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN)	SNI 8863:2019, Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan SNI 8864:2019, Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk kekerasan jalan SNI 8865:2019, Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan SNI 8866:2019, Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan SNI 8867:2019, Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin	SK No. 282/KEP/BSN/9/2022 tgl 2 September 2022	s/d 1 September 2024	
13.	LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian (LSPr- 004-IDN)	SNI 04-2763-1992, Lampu pengatur lalu lintas	SK No. 283/KEP/BSN/9/2022 tgl 2 September 2022	s/d 1 September 2024	

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
14.	LSPro PT Intertek Utama Service (LSPr- 052-IDN)	SNI 8361:2022, Pakaian dalam Wanita	SK No. 363/KEP/BSN/10/2022 tgl 3 Oktober 2022	s/d 2 Oktober 2024	
15	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 9098:2022, Minyak makan merah	SK No. 437/KEP/BSN/11/2022 tgl 7 November 2022	s/d 6 November 2024	

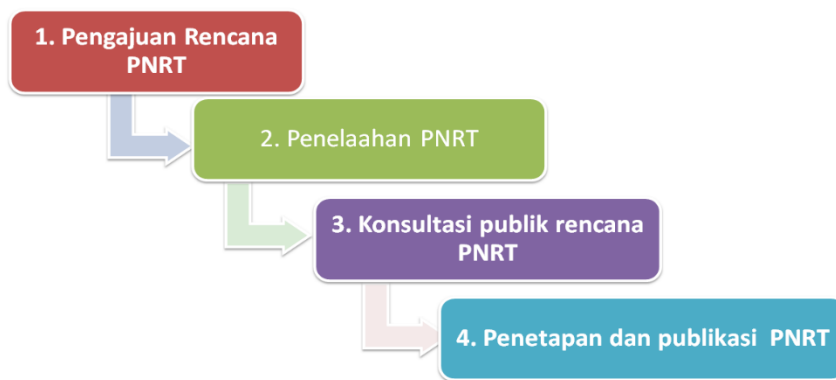
TABEL 3.7

DAFTAR SK KEPALA BSN TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKKAN LPK

No	LSPro	Lingkup	Kepka Pencabutan
1	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN)	SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi – Material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian	SK No. 197/KEP/BSN/7/2022 tgl 5 Juli 2022
2	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 19-4059-1996, Kantong plastik untuk pembibitan tanaman	SK No. 383A/KEP/BSN/10/2022 tgl 11 Oktober 2022 Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
3	LSPro PT Intertek Utama Service (LSPr- 052-IDN)	SNI 8914:2020, Tekstil – Masker dari kain	SK No. 529A/KEP/BSN/12/2022 tgl 1 Desember 2022

c. Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT)

Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik. Proses publikasi dan penetapan PNRT mencakup:



GAMBAR 3.2 MEKANISME PNRT SESUAI PBSN NO. 7 TAHUN 2020

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2022 mencakup 24 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari BATAN/BRIN, 1 SNI dari BIG dan 22 SNI dari Kemenperin. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan pada tahun 2022 sebanyak 4 SNI, dengan rincian:

- 3 SNI terkait kaca untuk bangunan – kaca isolasi, Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin, Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian yaitu SNI ISO 20492-2:2014, SNI 8801:2019, SNI 8822:2019, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian.
- 1 SNI terkait profil metadata spasial Indonesia, SNI 8843-1:2019, usulan regulasi teknis dari BIG.

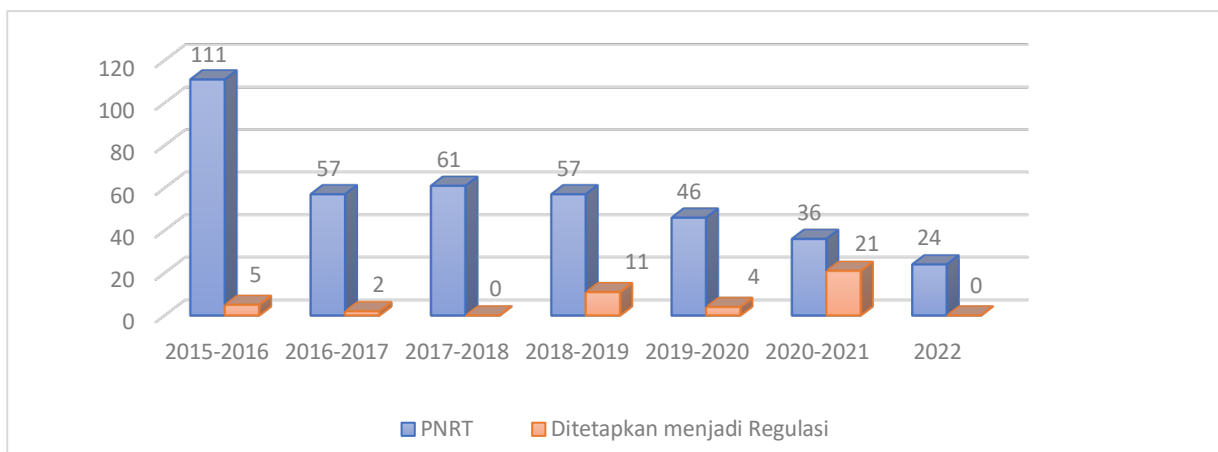
Selain itu, Pada tahun 2022 juga dilakukan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan untuk 16 SNI, yaitu terkait:

- 5 SNI Bahan baku plastik untuk Polipropilena, Polietilena (PE), Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas, Resin polivinil klorida (PVC), SNI 0594:2011, SNI 7808:2012, SNI 8432:2017, SNI 8887:2020, SNI 59:2017;
- 2 SNI terkait Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, tuna dalam kemasan kaleng untuk revisi SNI 8222:2016 dan SNI 8223:2016;
- 2 SNI terkait Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial, SNI 8660:2018, SNI 7613:2019;
- 2 SNI terkait Modul LED, Lampu LED swa-balast, SNI IEC 62612:2016, SNI IEC PAS 62717:2015;

- 2 SNI terkait Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool dan amandemennya, SNI 8421:2017, SNI 8421:2017/Amd.1:2020;
- 1 SNI terkait Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas, SNI 9040:2021;
- 1 SNI Kertas Pembungkus Rokok, SNI 3755:2019 dan;
- 1 SNI Pati Jagung, SNI 8523:2018.

Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI selama tahun 2022 yaitu 20 kebijakan yang ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk persentasi PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT yang diusulkan dapat dilihat dalam gambar berikut.



GAMBAR 3.3 PROGRES PNRT DAN REGULASI YANG DITETAPKAN PERIODE 2015-2022

Adapun untuk tahun 2023, BSN telah menerima 58 usulan rencana PNRT terdiri dari 1 usulan SNI ESDM, 1 SNI usulan BIG, 2 SNI usulan KKP, serta 49 SNI dan 6 Non-SNI usulan Kementerian Perindustrian untuk dapat ditetapkan menjadi wajib. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan penelaahan berdasarkan validitas SNI, kesiapan Lembaga penilaian kesesuaian, pelaku usaha serta potensi duplikasi dengan regulasi yang telah berlaku dan pertimbangan analisis dampak regulasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi K/L, penetapan PNRT tahun 2023 adalah 52 SNI karena:

- terdapat duplikasi pengajuan untuk pemberlakuan SNI BjLS (Baja Lembaran Lapis Seng) warna; dan
- terdapat 6 pengajuan non-SNI yang tidak dapat masuk dalam PNRT mengingat hal ini diluar cakupan dalam PBSN 7 tahun 2020, bahwa usulan PNRT hanya berlaku untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib, dari usulan PNRT yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga rencana PNRT Kementerian Perindustrian yang dilanjutkan terdapat 48 Usulan SNI valid.

Rincian PNRT dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.8
RENCANA PNRT 2023

No	Kementerian/ Lembaga	Jumlah			Keterangan
		PNRT	Rencana PNRT	Lanjutan PNRT tahun sebelumnya	
1	Kementerian Perindustrian	48 SNI	– 48 SNI valid – 1 SNI duplikasi – 6 Non-SNI	22 SNI	Non-SNI: PTC CPPOB, PTC GMP dan ST
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2 SNI	2 SNI	-	Revisi PermenKP No.58/Permen- KP/2016 merujuk pada SNI termutakhir
3	Kementerian ESDM	1 SNI	1 SNI	-	SNI 9040:2021- Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas- Persyaratan
4	BIG	1 SNI	1 SNI	1 SNI	SNI 8843 1:2019 - Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115- 1:2014, MOD)
	Jumlah	52 SNI	53 SNI + 6 Non SNI	23 SNI	

PNRT tersebut telah dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN, serta disampaikan kepada K/L terkait. Sebagaimana ketentuan dalam PBSN No.7 Tahun 2020, dalam hal mendesak, K/L terkait dapat mengusulkan pengurangan atau penambahan terhadap SNI yang akan diberlakukan wajib dalam PNRT. Penetapan 52 SNI dalam PNRT 2023 sebagai skala prioritas bagi K/L terkait dalam merumuskan regulasi teknis berbasis SNI.

Dari total SNI dalam PNRT 2023 terdapat 14 (empat belas) SNI yang akan diberlakukan wajib yang telah tersedia kajian analisis dampak regulasi (RIA) dan beberapa telah dilakukan notifikasikan dalam forum TBT-WTO, diantaranya sebagai berikut:

TABEL 3.9
KETERSEDIAAN RIA DAN PROGRES PNRT 2023

No	Nomor dan Judul SNI PNRT 2023 yang telah disertai RIA	Kementerian Pengusul	Keterangan (Progres)
1.	SNI 8421:2017, Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	Kementerian Perindustrian	Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/130) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO
2.	SNI 8421:2017/Amd.1:2020 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1		
3.	SNI 8887:2020, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas	Kementerian Perindustrian	Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO/ (G/TBT/N/IDN/151) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO
4.	SNI 7593:2020, Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum		
5.	SNI 7808:2018, Biji plastik polietilena		
6.	SNI 0594:2011, Polipropilena		
7.	SNI 8432:2017, Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif		
8.	SNI 59:2017, Resin Polivinil Klorida (PVC)		

No	Nomor dan Judul SNI PNRT 2023 yang telah disertai RIA	Kementerian Pengusul	Keterangan (Progres)
9.	SNI 180:2021, Alat Pemadam Api Portabel (APAP)		Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO(G/TBT/N/IDN/150) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO
10.	SNI 3755:2019, Kertas Pembungkus rokok		Kajian dan pembahasan pemberlakuan
11.	SNI 8660:2018, Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga		Kajian dan pembahasan pemberlakuan
12.	SNI 7613:2019, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil		Kajian dan pembahasan pemberlakuan
13.	SNI 9040:2021, Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas-Persyaratan	Kementerian ESDM	Kajian dan pembahasan pemberlakuan
14.	SNI 8843-1:2019, Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014, MOD)	BIG	Kajian dan pembahasan pemberlakuan, tidak dinotifikasikan karena tidak terkait perdagangan internasional

d. Kebijakan masa Transisi SNI

Untuk memastikan bahwa SNI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan kegiatan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang. Rekomendasi hasil kaji ulang berupa perlunya SNI baru, revisi SNI dan Abolisi SNI. Terkait dengan SNI revisi maka perlu ditetapkan masa transisi penerapannya guna untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan SNI. Pertimbangan Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan SNI baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI. Tahapan penetapan masa transisi SNI sebagai berikut:



GAMBAR 3.4 TAHAPAN PENETAPAN MASA TRANSISI SNI

Sampai dengan tahun 2022, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 759 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 110 SNI, SNI tahun 2021 sebanyak 181 SNI dan SNI tahun 2022 sebanyak 69.

Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 11 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 10 kebijakan berbasis penelitian dalam rangka penetapan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2022 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi.

TABEL 3.10
KEPUTUSAN KEPALA BSN TENTANG PENETAPAN MASA TRANSISI SNI TAHUN 2022

No	Nomor	Judul	Ruang Lingkup
1	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan 11 (Sebelas) Standar Nasional Indonesia	Perikanan
2	131/KEP/BSN/5/2022	Penetapan Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2022	Pangan
3	228/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI IEC/ISO 31010:2016 Manajemen Risiko Teknik Penilaian Risiko	Manajemen Risiko
4	229/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik Dan Bioplastik Mudah Terurai	Ekolabel
5	231/KEP/BSN/7/2022	Penetapan 12 (Dua Belas) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2022	Material, Peternakan dan Perikanan
6	353/KEP/BSN/9/2022	Penetapan 9 (Sembilan) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2022	Kendaraan & Peralatan, Perkebunan dan Kimia
7	354/KEP/BSN/9/2022	Pencabutan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia Yang Direvisi	Analisis Sensori
8	386/KEP/BSN/10/2022	Penetapan 10 (Sepuluh) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2022	Bangunan Kapal & Konstruksi Kelautan

No	Nomor	Judul	Ruang Lingkup
9	555/KEP/BSN/12/2022	Pencabutan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia	Produk Kopi
10	556/KEP/BSN/12/2022	Penetapan 5 (Lima) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2022	Makanan dan Minuman

2.2

Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders

Rekomendasi kebijakan penerapan SPK adalah rekomendasi hasil kajian penerapan SPK yang mencakup fasilitasi penerapan SNI oleh organisasi, pelaku usaha dan LPK, pengendalian penerapan SPK, regulasi teknis berbasis SPK dan *Spesifik Trade Concern* (STC), serta ketentuan STRACAP dalam perjanjian dan atau perundingan internasional.

Target rekomendasi kebijakan SPK yang ditindaklanjuti adalah 86% dengan realisasi 107% persen atau mencapai 124% tercapai.

Rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi hasil fasilitasi penerapan SNI yang dilakukan BSN yang ditindaklanjuti oleh organisasi dan pelaku usaha termasuk UMKM.

Dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kebijakan dalam pendekatan fasilitasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri dan organisasi. Untuk UMKM dan industri, fasilitasi penerapan SNI berorientasi kepada penerapan SNI Produk. Pada tahun 2022, pembinaan penerapan SNI dilakukan untuk 212 UMKM. Dari 200 UMKM yang dibina, terdapat 59 UMKM mendapatkan sertifikasi SNI. Rekomendasi kebijakan fasilitasi sertifikasi SNI dengan mempertimbangkan komitmen UMKM dan kebutuhan pasar yang mempersyaratkan SNI dalam transaksi pasarnya. Daftar UMKM yang difasilitasi sertifikasi SNI tahun 2022 seperti dalam Tabel 3.11.

TABEL 3. 11 DAFTAR FASILITASI KEPADA UMK DALAM PENERAPAN DAN SERTIFIKASI SNI

No	Nama UMKM	Produk	SNI	Provinsi
1.	Rumah Batik Andalan	Batik Cap	SNI 8303:2016/Amd.1:2019 Batik cap - Kain - Ciri syarat mutu dan metode uji	Riau
2.	Pathok	Kopi bubuk	SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Jawa Timur
3.	PT Rumah Makan Deltasari Indah	Pengolahan Bebek-ayam ungkep, aneka bumbu, aneka sambal, abon ayam, olahan bebek-ayam frozen dalam kemasan siap saji, mulai dari penerimaan bahan baku sampai penyimpanan produk jadi	SNI ISO 22000:2018 Sistem manajemen keamanan pangan - Persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan (ISO 22000:2018 IDT Eng)	Jawa Timur
4.	PT Gadih Minang Anugerah	Rendang Daging Sapi	SNI 7474:2009 Rendang daging sapi	Sumatera Barat
5.	Koperasi Berkah Bersama Darul Mursyid	Kopi bubuk	SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Utara
6.	CV. Pratama	Air Mineral	SNI 3553:2015 Air Mineral	Nusa Tenggara Barat
7.	Rendang Uni Lili	Rendang Daging Sapi	SNI 7474:2009 Rendang daging sapi	Sumatera Barat
8.	CV Butawarna Unit Desain	Produk Kerajinan Tekstil	ISO 9001:2015 oleh organisasi dalam rantai pasokan pada sektor energi nuklir yang memasok produk dan jasa yang penting bagi keselamatan nuklir (PBKN) (ISO 19443:2018 IDT)	Jawa Timur
9.	Madu Hutan Asli Sriwijaya	Madu	SNI 3545:2013 Madu	Sumatera Selatan
10.	PT Triberg Wasser Indonesia	Air Demineral	SNI 6241:2015 Air Demineral	Sulawesi Utara
11.	CV Andias	Air Mineral	SNI 3553:2015 Air Mineral	Sulawesi Selatan

No	Nama UMKM	Produk	SNI	Provinsi
12.	Bambang Alianto Sulistijo	Pakaian Bayi	SNI 7617:2013/Amd1:2014 Tekstil - Persyaratan zat warna azo kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain AMANDEMEN 1	Jawa Timur
13.	PT Hikmah Hijrah Bersama	Garam konsumsi beryodium	SNI 3556:2016 Garam konsumsi beriodium	Jawa Barat
14.	CV Adhyasta Perkasa	minyak goreng sawit	SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit	Jawa Barat
15.	CV. Naya Abimantrana	Pakaian Bayi	SNI 7617:2013/Amd1:2014 Tekstil - Persyaratan zat warna azo kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain AMANDEMEN 1	Jawa Timur
16.	Dapur Buweek	Keripik tempe	SNI 2602:2018 Keripik tempe	Sulawesi Selatan
17.	CV. Yumeda Pangan Sejahtera	Es Krim	SNI 3713:2018 Es Krim	DI Yogyakarta
18.	Koperasi Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed	Garam Konsumsi Beryodium	SNI 3556:2016 Garam konsumsi beriodium	Bali
19.	UD. Jaya Abadi	Minyak goreng Sawit	SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit	Jawa Timur
20.	PT. Langkah Hijau Bersama	Organik	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Riau
21.	UKM Sari Rasa	bumbu pecel dan bumbu gado-gado	SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan	Jawa Timur
22.	PT Portal Indonesia Group	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Selatan
23.	Pempek Umi Abi	Pempek Ikan Rebus Beku	SNI 7661.1:2013 Pempek ikan rebus beku - Bagian 1: Spesifikasi	Sumatera Selatan
24.	Nadina Salim	Kain Jumputan	SNI 7617:2013/Amd1:2014 Tekstil - Persyaratan zat warna azo kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain AMANDEMEN 1	Sumatera Selatan

No	Nama UMKM	Produk	SNI	Provinsi
25.	Koperasi Kopi Cap Bukit Jempol Lahat	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Selatan
26.	UMKM Rumah Lele	Abon Ikan	SNI 7690.1:2013 Abon ikan - Bagian 1: Spesifikasi	Sumatera Selatan
27.	CV. Isfandari Group	Air Demineral	SNI 6241:2015 Air Demineral	Sumatera Selatan
28.	UKM Kopi Tanah Puyang	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Selatan
29.	Pempek Mom & Khi	Pempek Ikan Rebus Beku	SNI 7661.1:2013 Pempek ikan rebus beku - Bagian 1: Spesifikasi	Sumatera Selatan
30.	Pudot Craft	Kain Jumputan	SNI 7617:2013/Amd1:2014 Tekstil - Persyaratan zat warna azo kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain AMANDEMEN 1	Sumatera Selatan
31.	Martien Liando-Jagadraye Coffee	Biji Kopi (Robusta dan Arabika)	SNI 2907:2008 Biji kopi	Sumatera Selatan
32.	IKM Putra Abadi	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Selatan
33.	Kuliner Lemak Raso	Pempek ikan rebus beku	SNI 7661.1:2013 Pempek ikan rebus beku - Bagian 1: Spesifikasi	Sumatera Selatan
34.	Terazz'lbon Collection	Masker dari kain	SNI 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain	Sumatera Selatan
35.	ELLAFROZE	Bakso Ikan	SNI 7266:2017 Bakso ikan	Jawa Tengah
36.	Koperasi Pesantren Nurul Falaah	AMDK	SNI 3553:2015 Air Mineral	Jawa Barat
37.	Koperasi Koerintji Barokah Bersama	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sumatera Selatan
38.	Project Mard	Pakaian Bayi	SNI 3472:2009 Pengelasan saluran pipa dan fasilitas yang terkait	Sulawesi Selatan
39.	Cemplik	Pakaian dalam wanita	SNI 8361:2017 Pakaian dalam Wanita	Jawa Barat
40.	CV. POKI CAHAYA ABADI	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sulawesi Selatan
41.	PT. Galang Smart Indonesia	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sulawesi Selatan

No	Nama UMKM	Produk	SNI	Provinsi
42.	PT Tirta Rifana Gowa	AMDK	SNI 3553:2015 Air Mineral	Sulawesi Selatan
43.	CV. FOREST COFFEE	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk	Sulawesi Selatan
44.	CV Putri Intan Kencana	Minuman Sari Buah	SNI 3719:2014 Minuman sari buah	Jawa Barat
45.	HNR Food	Rendang dalam kemasan	SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan	DI Yogyakarta
46.	Rumah Mesin	Mesin Pertanian		DI Yogyakarta
47.	Fatima Iskandar	Cokelat	SNI 7934:2014 Cokelat dan produk-produk cokelat	Sulawesi Tengah
48.	PT. Multi Klin Nusantara	Deterjen Serbuk	SNI 4594:2017 Detergen serbuk	Sulawesi Selatan
49.	CV. Siputri	Batik	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	Jawa Tengah
50.	Hilwa Songket	TPT (KAIN & FASHION)	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	Sumatera Utara
51.	Nyalakok Tenun	TPT (KAIN & FASHION)	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	Nusa Tenggara Barat
52.	Koperasi Tegal Manufactur Indonesia	Produk logam	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	Jawa Tengah
53.	Rayya Sories Tas Kulit	Tas Kulit	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	DI Yogyakarta
54.	Creative Batik	TPT (KAIN & FASHION)	SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015 IDT)	DI Yogyakarta
55.	Paradise Batik	Batik	SNI 8304:2016 Batik kombinasi – Kain - Ciri, syarat mutu dan metode uji SNI 8303:2016 Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji SNI 8302:2016 Batik tulis – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji	DI Yogyakarta
56.	Kelompok Tani Margo Mulyo Menoreh	Kopi bubuk	SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan	DI Yogyakarta

No	Nama UMKM	Produk	SNI	Provinsi
57.	PT, Azaki Food International	Tempe Kedelai	SNI 2144:2015 Tempe Kedelai	Jawa Barat
58.	CV. Ocean Water Tandoang	Air Mineral	SNI 3553:2015 – Air Mineral	Sulawesi Selatan
59.	Pramessti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS)	Abon Ikan	SNI 7680.1:2013 Abon Ikan- Bagian Spesifikasi	Kalimantan Tengah

Selain kepada UMK, kebijakan fasilitasi pendampingan penerapan SNI juga diberikan kepada 94 organisasi. Fasilitasi penerapan SNI pada organisasi diutamakan pada SNI yang dapat membantu organisasi memberikan pelayanan publik secara prima dan berintegritas. Pada tahun 2022, SNI yang diterapkan oleh organisasi meliputi SNI ISO 37001, SNI ISO 9001, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam, SNI ISO 35001, SNI ISO 21001, SNI CHSE, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam dan SNI Pasar Rakyat. Ada 27 organisasi dan industri yang didampingi BSN berhasil memperoleh sertifikasi SNI. Daftar 27 organisasi dan industri yang berhasil menerapkan SNI seperti dalam Tabel 3.12.

TABEL 3.12
DAFTAR FASILITASI KEPADA ORGANISASI DAN INDUSTRI DALAM PENERAPAN SNI

No.	Nama Organisasi / Industri	SNI yang Tersertifikasi		Provinsi
1	Bea Cukai Tj Priok	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	DKI Jakarta
2	Baristand Padang	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Sumatera Barat
3	BBTKLPP Jakarta	SNI 8340 :2016 / SNI ISO 35001 :2019	Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	DKI Jakarta
4	BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta)	SNI 8340 :2016 / SNI ISO 35001 :2019	Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	DKI Jakarta
5	Politekes Manado	SNI ISO 21001 :2018	Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan	Sulawesi Utara
6	Pasar Lembur Situ	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
7	Pasar Johar	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
8	Pasar Pasalaran	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
9	Pasar Sidarahayu	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
10	Pasar Dasan Agung	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Organisasi / Industri	SNI yang Tersertifikasi		Provinsi
11	Pasar Cisarua Bogor	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
12	PT Surya Mas Indobaja	SNI 8399 :2017	Profil rangka Baja Ringan	Sulawesi Selatan
13	DTW Candi Borobudur	SNI 9042 :2021	CHSE	DI Yogyakarta
14	BKKBN Banten	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Banten
15	PT Selaras Alam Sejahtera	SNI 7763 : 2018	Pupuk Organik Padat	Jawa Tengah
16	Pasar Cicalengka	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
17	Pasar Soreang	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	Jawa Barat
18	PT. Triberg Wasser	SNI 6241 : 2015	Air Demineral	Sulawesi Utara
19	Manohara Resto	SNI 9042 :2021	CHSE	DI Yogyakarta
20	Pasar Prawirotaman	SNI 8152 :2015 / 2021	Pasar Rakyat	DI Yogyakarta
21	Itjen Kemendikbud	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	DKI Jakarta
22	BKKBN Sumatera Barat	SNI ISO 37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Sumatera Barat
23	Perhutani - Rancaupas	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam	Jawa Barat
24	Perhutani - Curug Cilember	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam	Jawa Barat
25	Perhutani - Kawah Putih	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam	Jawa Barat
26	Perhutani - Gn. Galunggung	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam	Jawa Barat
27	Perhutani Dlundung	SNI 8013 :2014	Pengelolaan Pariwisata Alam	Jawa Barat

Untuk mendukung UU Cipta Kerja, Deputi bidang PSPK menetapkan kebijakan untuk melakukan Pembinaan SNI Bina UMK kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk kategori risiko rendah melalui aplikasi SNI Bina UMK, sehingga UMK Indonesia bisa naik kelas dan berdaya saing. Dalam melakukan pembinaan ini, Deputi bidang PSPK juga menetapkan Kebijakan untuk Penguatan Kolaborasi dengan berbagai institusi Pembina UMK dalam pendampingan penerapan SNI Bina UMK berbasis OSS RBA. Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan institusi Pembina UMK lain mencakup fasilitasi penerapan dan sertifikasi SNI, pelatihan untuk fasilitator penerapan SNI terutama untuk Usaha mikro kecil, pemanfaatan tenaga penyuluh/pendamping UMK di masing-masing wilayah baik dari pemerintah daerah, komunitas Pembina UMK, perguruan tinggi dan BUMN. Kolaborasi program Bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM bagi UMK risiko rendah yang telah memperoleh NIB dan tanda SNI Bina UMK telah diberikan kepada 500 UMK dan juga telah memberi

pelatihan kepada 500 fasilitator penerapan SNI di 5 wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Maluku Utara,

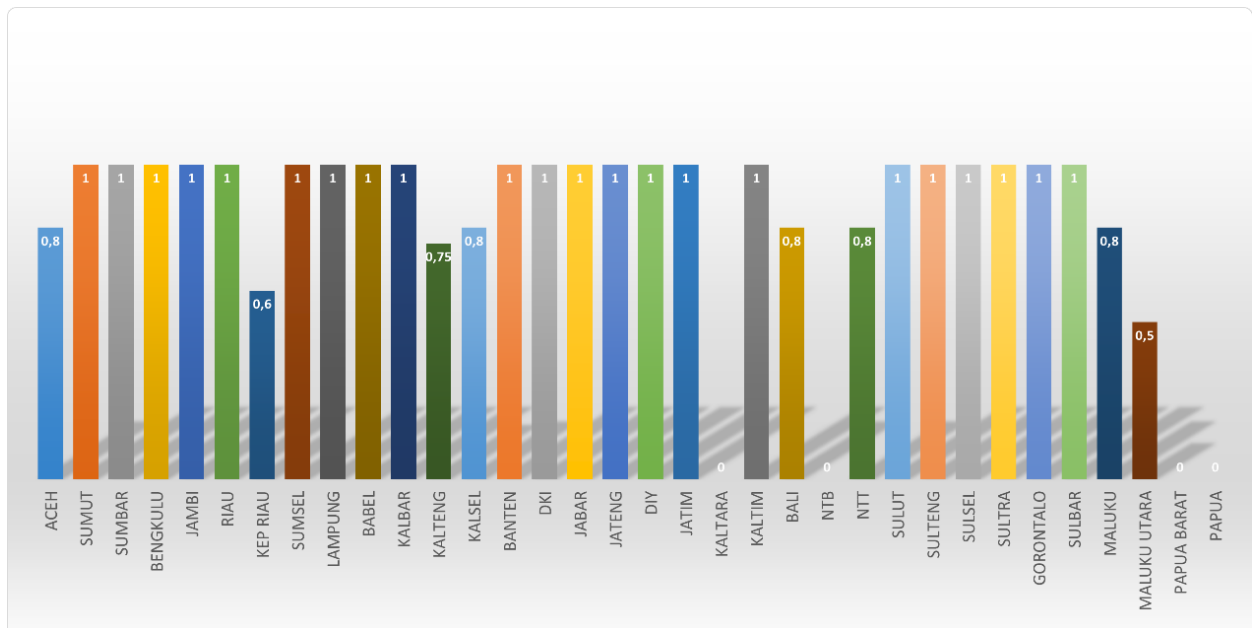
Untuk lebih meningkatkan *awareness* pemerintah daerah, organisasi dan pelaku usaha pada standar dan penilaian kesesuaian, Deputi bidang PSPK menetapkan kebijakan Penguatan Kantor Layanan Teknis (KLT) berorientasi kebutuhan pemerintah daerah dan produk unggulan di wilayah KLT dan daerah sekitar. Melalui Kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memahami dengan baik esensi dan signifikansi SPK. Selain itu dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk unggulan daerah baik di pasar nasional maupun pasar global. Salah satu upaya untuk memasarkan produk UMK yang sudah berSNI, Deputi bidang PSPK memperkuat Platform digital etalase digital produk UMK berSNI bekerjasama dengan Toko mutu Indonesia. Platform digital ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM sebagai sarana promosi dan dapat meningkatkan akses pasar mereka lebih luas lagi.

b. Rekomendasi penerapan SNI bidang PK yang ditindaklanjuti Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Untuk memperkuat ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam mendukung kegiatan penilaian kesesuaian terhadap barang/jasa di wilayah Indonesia, Deputi Bidang PSPK menetapkan kebijakan Fasilitasi LPK berbasis produk unggulan daerah dan Sektor Usaha. Agar program fasilitasi LPK dapat dilaksanakan tepat sasaran, Deputi PSPK melakukan identifikasi dan memetakan dukungan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk unggulan daerah dan pengembangan usaha di 24 Provinsi di Indonesia mengacu pada dokumen Rencana Pengembangan Induk Provinsi (RPIP). Analisis Dukungan LPK dilakukan:

Pertama, Analisis dukungan LPK untuk mendukung produk unggulan daerah dilakukan dengan membandingkan ketersediaan ruang lingkup LPK di suatu provinsi dengan produk unggulan daerah pada setiap Provinsi.

Kedua, Analisis dukungan LPK dalam mendukung pengembangan usah di setiap provinsi dilakukan melakukan identifikasi dukungan ruang lingkup LPK terhadap sektor usaha sesuai RPIP daerah.



GAMBAR 3.5

GRAFIK RASIO DAYA DUKUNG LPK TERHADAP PRODUK UNGGULAN DAERAH

Dalam upaya untuk meningkatkan rasio ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk mendukung kebutuhan produk unggulan daerah, pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi kepada 33 LPK yang terdiri atas 17 Laboratorium dan 16 Lembaga Sertifikasi yang terdiri dari lembaga Sertifikasi Produk / lembaga standar yang diacu dalam fasilitasi sesuai dengan persyaratan LPK seperti SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17020:2020, SNI ISO/IEC 17021-1:2015, dan SNI ISO/IEC 17029:2019. Wilayah yang memperoleh fasilitasi LPK adalah provinsi DI Yogyakarta, Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Bali, Sumatera Utara, DI Aceh, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan fasilitasi berkolaborasi dengan K/L/D, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TNI Angkatan Darat, POLRI, BSSN, PLN, UPT Dinas Pemprov, dan Universitas.



GAMBAR 3.6 SEBARAN WILAYAH FASILITASI LPK TAHUN 2022

Target kebijakan fasilitasi LPK adalah LPK siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) LPK binaan yang telah selesai dilakukan fasilitasi dan direkomendasikan untuk segera mengajukan akreditasi KAN, sebagaimana Tabel 3.13.

TABEL 3.13 LPK BINAAN BSN YANG TELAH SELESAI PROSES FASILITASI TAHUN 2022

Laboratorium	Skema	Ruang Lingkup Pengujian
1. BPMJB Dinas PUPR Prov. Gorontalo	Lab Uji	Kuat tekan beton, Agregat, aspal
2. Lapalkes Pukses AD	Lab Kalibrasi	Kalibrasi alat kesehatan (timbangan bayi)
3. Poltekkes Tanjungkarang	Lab Uji	Air Bersih
4. Poltekkes Semarang	Lab Uji	Radiologi
5. Poltekkes Bandung	Lab Uji	Uji Air Sanitasi
6. Poltekkes Yogyakarta	Lab Uji	Air bersih dan udara
7. Poltekkes Surabaya	Lab Uji	Mikrobiologi Pangan
8. Poltekkes Banjarmasin	Lab Uji	Air bersih dan udara
9. Poltekkes Malang	Lab Uji	Uji Proksimat pada makanan
10. Poltekkes Manado	Lab Uji	Air bersih dan pangan
11. Puslitbang Mabes POLRI	Lab Uji	Senjata dan alat Pelindung diri
12. BPSMB Maluku Utara	Lab Uji	Kopra dan Cengkeh/ Fuli

Laboratorium	Skema	Ruang Lingkup Pengujian
13. Universitas Warmadewa	Lab Uji	PCR Covid
14. Universitas Veteran Yogyakarta	Lab Uji	Kalorimeter
15. Poltekkes Medan	Lab Uji	Mikrobiologi dan Kimia Pangan
16. Poltekkes Ternate	Lab Uji	Air Bersih
17. Dinas Ketahanan Pangan Lampung	Lab Uji	Beras

Pada Tabel 3.14 Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi yang difasilitasi selama tahun 2022

TABEL 3.14 LEMBAGA SERTIFIKASI/LEMBAGA INSPEKSI YANG DIFASILITASI

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
1	BPSMB Prov. Aceh	LSPro	Bubuk Kopi, AMDK
2	BPSMB Prov. Jambi	LSPro	SIR, AMDK, Kopi Instan dan Biji Kopi
3	Badan Siber dan Sandi Negara	LSPro	Modul Sandi dan Keamanan Perangkat Teknologi Informasi
4	BPPI – Kementerian Kelautan dan Perikanan	LSPro	Benang Polyamide (PA) monofilament untuk alat penangkapan
5	BPSMB Prov. Kalimantan Timur	LSPro	Pasar Rakyat
6	BPSMB Prov. Kalimantan Selatan	LSPro	SIR dan Pasar Rakyat
7	BPSMB Prov. Kalimantan Barat	LSPro	SIR dan Pasar Rakyat
8	BPSMB Prov. Kalimantan Tengah	LSPro	SIR dan Minyak Goreng
9	BPSMB Prov. Bali	LSPro	Pasar Rakyat
10.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	LSO	Produk Tanaman, Tanaman segar, Produk khusus
11	Balai Besar Karet Kulit dan Plastik Yogyakarta	LI	Lingkungan Kerja industri karet, kulit dan plastik untuk (1) Pencahayaan, (2) Nilai Ambang Batas Iklim Indeks Suhu Basah dan (ISBB), (3) Kebisingan, (4) Getaran, (5) Partikulat, (6) Kebauan.
12	PT Sertifikasi Kontraktor Indonesia	LSBU	Konstruksi

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
13	LS INKINDO	LSBU	Konstruksi
14	PT Bina Mitra Rancang Bangun	LSBU	Konstruksi
15	BBSPJIHPMM Makassar	LSSM	Alat dan Mesin pertanian
16.	PLN Pusertiv	LVV	Gas Rumah Kaca

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat 5 (lima) LPK yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Terdapat 5 lembaga penilaian kesesuaian yang dibimbing mendapat akreditasi dari KAN. Adapun kelima lembaga tersebut adalah:

1. Penyelenggara Uji Profisiensi Badan Narkotika Nasional
2. Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB Palu
3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar
4. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBBAT) Sukabumi
5. Laboratorium PSMB Palu untuk penambahan ruang lingkup pengujian bawang goreng

Pada Tahun 2022 ini terdapat 9 Lembaga penilaian kesesuaian yang sedang dalam proses akreditasi KAN. LPK tersebut diantaranya:

1. Laboratorium pengujian Puslitbang Polri
2. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Kupang
3. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Semarang
4. Laboratorium pengujian BPMJB Gorontalo
5. Laboratorium kalibrasi Lapalkes Puskes AD
6. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Timur
7. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Tengah
8. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Inkindo
9. Lembaga Sertifikasi PT SKI

Dalam rangka pemenuhan kewajiban di tingkat regional (ASEAN) yaitu mengenai keberterimaan LPK untuk mendukung JSC EEE-MRA, telah dilakukan fasilitasi untuk keberterimaan LPK di negara tujuan wilayah ASEAN. LPK tersebut sebagaimana dalam Tabel 3.15

TABEL 3.15 DAFTAR LPK YANG MENGIKUTI SKEMA JSC EEE MRA

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Lembaga Sertifikasi Produk (Certification Body)					
1.	PPMB	6 Maret 2019 – 5 Maret 2022	4 September 2022	Proses re-akreditasi	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Vietnam
2.	Sucofindo ICS	23 September 2020 – 22 September 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam
3.	PT Qualis Indonesia	17 Desember 2019 - 16 Desember 2022		Sudah mengajukan perpanjangan ke BSN	Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021– 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam
5.	TUV Nord Indonesia	Pengajuan baru		Kontestasi dengan Thailand	

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Laboratorium Penguji (Testing Laboratory)					

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
1.	BPMB	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
2.	B4T	12 Februari 2019 – 11 Februari 2022	10 Agustus 2022	Sudah mengajukan perpanjangan ke BSN	
3.	PT. Sucofindo Laboratory	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021 – 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
5.	PT. Qualis Indonesia	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
6.	PT. Hartono Istana Teknologi	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

Deputi Bidang Penerapan SPK juga telah menerbitkan Penduan Umum Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2012 untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, dan Panduan untuk Jaminan mutu untuk laboratorium pengujian. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan fasilitasi LPK masih diperlukan integrasi data pada SISPK yang

memuat data LPK baik telah diakreditasi maupun LPK yang ditunjuk untuk ruang lingkup akreditasi SNI sukarela. Selain itu optimalisasi MOU yang telah dilakukan antara BSN dengan Pemerintah Daerah dengan menekankan perlunya dukungan sumberdaya dan infrastruktur di kedua pihak.

c. Rekomendasi hasil pengendalian penerapan standar berdasarkan uji petik produk ber-SNI yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, KAN, LPK terakreditasi KAN, dan pelaku usaha.

Kegiatan pengendalian penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Direktorat Penguatan PSPK BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Pengembangan Standar – BSN untuk melakukan kaji ulang SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha
3. Menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yang terakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan LSPro untuk memastikan pemenuhan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk terhadap SNI.
4. Meminta klarifikasi kepada pelaku usaha mengenai kendala dalam pemenuhan persyaratan SNI kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
5. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI dan mempromosikan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.

d. Rekomendasi notifikasi regulasi di TBT WTO dan STC Indonesia dan negara anggota WTO yang ditindaklanjuti

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan enquiry, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO. Pada tahun 2022 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.16 JUMLAH KEBIJAKAN PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Kebijakan	Jumlah
Notifikasi regulasi teknis	16
Analisis tanggapan dan pengajuan enquiry	62
Pengajuan Specific Trade Concern	5
Pemberian tanggapan Specific Trade Concern	5

Notifikasi pada tahun 2022 sebanyak 16 notifikasi, terdiri dari 12 notifikasi regular dan 4 notifikasi addendum. Tanggapan dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO dan sebaliknya adalah sebanyak 62 tanggapan.



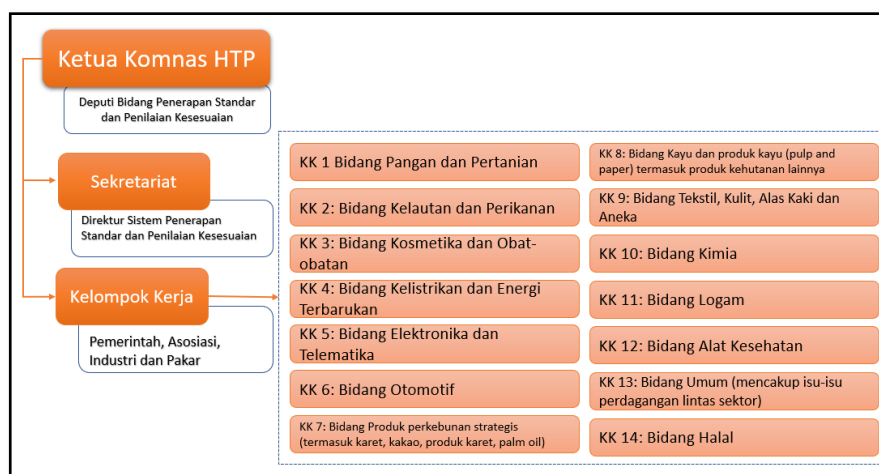
GAMBAR 3.7 JUMLAH NOTIFIKASI INDONESIA PERIODE 2012-2022

Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan, selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam komnas untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke *enquiry point* Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun.



GAMBAR 3.8 TAHAPAN PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DALAM KOMITE NASIONAL HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Anggota Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan terdiri atas perwakilan berbagai K/L dan stakeholder yang terkait. Untuk membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut pada Gambar 3.9.



GAMBAR 3.9 STRUKTUR KOMNAS DAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Pada tahun 2022 Indonesia mengajukan STC dalam sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali yaitu pada:

TABEL 3.17 RANGKAIAN PERTEMUAN SIDANG TBT WTO TAHUN 2022

Tanggal	Kegiatan
10 Februari	Informal meeting
8 Maret	Thematic Session on Accreditation
9-11 Maret	Pertemuan Reguler
27 April	Informal meeting
29 Juni	Informal meeting
12 Juli	Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency
13-15 Juli	Pertemuan Reguler
13 Oktober	Informal meeting
15 November	Thematic Session on GRP and Standard Development in Codex
16-18 November	Pertemuan Reguler

Pada pertemuan *Thematic Session* yang diselenggarakan sebelum Sidang Komite TBT, BSN ataupun K/L telah berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai narasumber (pembicara) terkait dengan topik yang dibahas.

TABEL 3.18

NARASUMBER INDONESIA DALAM PERTEMUAN THEMATIC SESSION SIDANG TBT WTO

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
Thematic Session on Accreditation	Indonesia Accreditation Policy in Supporting the Acceptance of Export Product	Sugeng Raharjo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi)
Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency	Indonesia's Experience on Promoting Standard Implementation to the MSMEs	Dr. Zakiyah (Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian)
Thematic Session on GRP	Implementation Of GRP In Formulating Food Safety Regulations In Indonesia	Anisyah (Direktur Standardisasi dan Pangan Olahan, BPOM)

Informal Meeting TBT WTO

Pembahasan *informal meeting* yang dilakukan bersama Sekretariat WTO dan Anggota, membahas mengenai Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia menyampaikan masukan melalui JOB/TBT/439 tanggal 8 Februari 2022 tentang masukan mengenai:

- prinsip *risk assessment* dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko.
- mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Dokumen Proposal Penilaian Kesesuaian dilanjutkan ISO/IEC pembahasannya menjadi dokumen *Element Paper: Draft Elements for the Non-Prescriptive Practical Guidelines to Support Regulators in the Choice and Design of Appropriate and Proportionate Conformity Assessment Procedures* (JOB/TBT/438). Dokumen tersebut berisi tentang pertimbangan umum, prinsip prosedur penilaian kesesuaian, dan jenis (tipe) penilaian kesesuaian.

Indonesia juga memberikan tanggapan terkait *draft Element Paper* melalui dokumen JOB/TBT/460 tanggal 13 Mei 2022, yang mengusulkan untuk memasukkan aspek *Market Surveillance* yang ditentukan oleh Pemerintah dalam menentukan prosedur penilaian kesesuaian serta perlunya justifikasi atau petunjuk lanjutan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan penilaian kesesuaian.

Sidang Reguler Komite TBT

Dalam pertemuan Sidang Reguler Komite TBT tahun 2022, dibahas mengenai kebijakan yang menghambat perdagangan Indonesia seperti pemberlakuan Standar India dan sertifikasi produk kertas fotokopi Indonesia ke India, hambatan ekspor ban, hambatan pendaftaran produk pangan olahan Indonesia ke China, penurunan batas residue pestisida Uni Eropa serta hambatan ekspor produk oleokimia ke India. *Specific Trade Concern* yang disampaikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.19.

TABEL 3.19 STC YANG DIAJUKAN OLEH INDONESIA DALAM SIDANG TBT WTO

No	Negara / STC Ofensif
1	India - Plain Copier Paper (Quality Order) 2020 (G/TBT/N/IND/140)
2	India – Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles
3	China - General Administration of China Custom (GACC) Decree 24
4	EU – Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (G/TBT/N/EU/908)
5	India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances

Pelaku usaha Plain Copier Paper Indonesia menyampaikan telah mendapatkan Bureau of Indian Standards (BIS) license sebagai persyaratan ekspor sehingga saat ini sudah tidak terdapat hambatan ekspor produk kertas foto kopi.

Lebih lanjut, Indonesia menerima STC terkait dengan kebijakan halal, PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, kuota impor, penilaian kesesuaian produk AC serta rancangan peraturan SKEM pada produk elektronik. Lebih lanjut, STC yang dibahas dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut:

TABEL 3.20 STC YANG DIAJUKAN KEPADA INDONESIA DALAM SIDANG TBT WTO

No	STC Defensif
1	Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations
2	Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act"
3	Import quota and SNI certification requirements
4	Remote factory audit for air conditioners
5	Draft decree regarding Minimum Energy Performance (SKEM) and Energy Saving Label for various products

Pertemuan Bilateral dan Webinar Session Sidang TBT WTO

Dalam rangkaian pertemuan Sidang TBT WTO, dilaksanakan pula Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya, yakni:

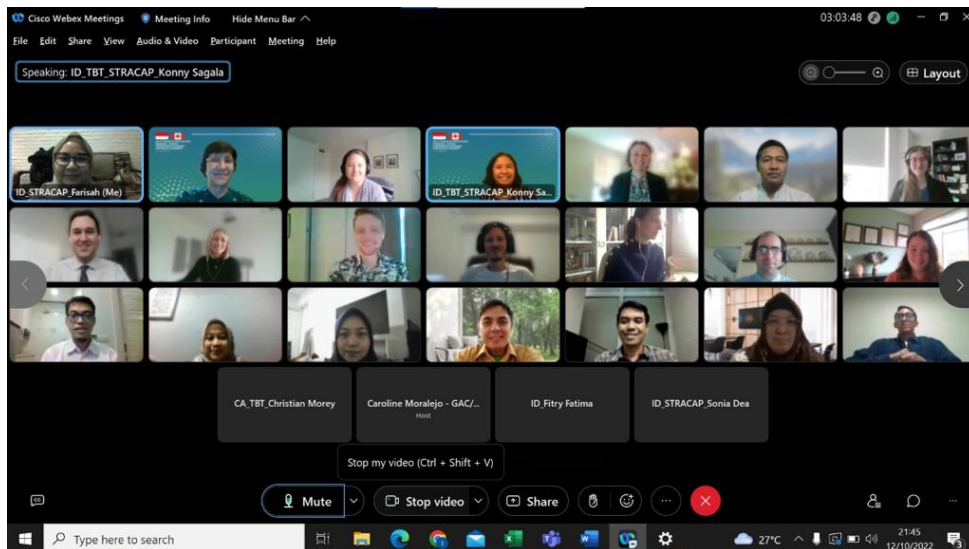
TABEL 3.21 PERTEMUAN BILATERAL INDONESIA DALAM SIDANG TBT WTO

Negara	Isu yang dibahas
Amerika Serikat	Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021
Uni Eropa	Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021
India	Perkembangan isu hambatan ekspor kertas fotokopi, produk ban serta produk oleokimia Indonesia
Thailand	Perkembangan kebijakan sertifikasi SNI produk AC Indonesia

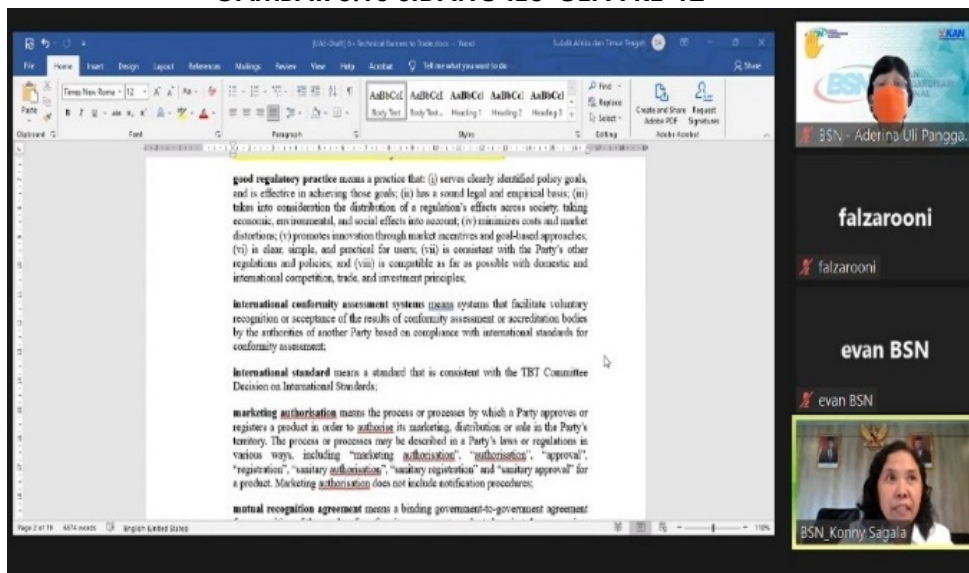
Selain pertemuan bilateral, Indonesia mengadakan kegiatan *Webinar Session on the Implementation of Halal Assurance System in Indonesia* pada tanggal 7 Maret 2022 dengan seluruh *Enquiry Point* Anggota WTO. Pertemuan yang dibuka oleh Deputi PSPK BSN tersebut membahas mengenai daftar *enquiry* atau pertanyaan yang disampaikan kepada Indonesia terkait dengan notifikasi regulasi halal dan adendumnya yakni G/TBT/N/IDN/131, G/TBT/N/IDN/134, G/TBT/N/IDN/138, G/TBT/N/IDN/139 dan G/TBT/N/IDN/140. Pertemuan yang dihadiri oleh 132 peserta melalui zoom tersebut secara daring, menyampaikan mengenai respon Indonesia terhadap pertanyaan yang diajukan seputar notifikasi halal BPJPH.

e. Rekomendasi di bidang STRACAP dari proses berdasarkan perundingan atau kesepakatan internasional yang untuk difindaklanjuti oleh stakeholder

Perundingan perdagangan internasional selama tahun 2022 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Perundingan yang dilakukan merupakan satu kesatuan perjanjian yang komprehensif di berbagai bidang yang membentuk satu *Trade Agreement* (TA) dimana isu SPK menjadi salah satu *Chapter/Article* dalam TA tersebut dan BSN bertindak sebagai *lead negotiatornya*. Rangkaian perundingan dilakukan baik di forum bilateral (IEUCEPA, IUAECEPA, IETO TETO Taiwan), regional (ACCSQ, ASEAN+1 FTA), dan multilateral (*Trade Policy Reviews* WTO dan Implementasi *the Trade Facilitation Agreement* WTO).



GAMBAR 3.10 SIDANG IEU-CEPA KE-12



GAMBAR 3.11 SIDANG I-UAE CEPA (HYBRID)

Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, dan isu pendukung lain yang dipandang penting seperti transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa, *contact point*, dan isu lain berdasarkan kesepakatan bersama. Berkenaan dengan perundingan bilateral, rekomendasi posisi Indonesia yang telah disampaikan pada beberapa forum, yaitu:

- Perundingan Indonesia Canada CEPA WG STRACAP
- Perundingan Indonesia UEA CEPA WG STRACAP
- Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT

Selain tersebut diatas, Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga telah menyelesaikan posisi Indonesia pada perundingan dengan negara mitra dan



sekarang dalam tahap implementasi baik di forum bilateral (Indonesia-Australia/IACEPA), regional (ASEAN-Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, *Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*). Pemanfaatan perundingan di bidang SPK tersebut telah dilakukan melalui perumusan program kerja bersama dengan K/L dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.

Implementasi IACEPA dilakukan melalui koordinasi dengan BAPPENAS yang merupakan institusi yang bertanggung jawab di bidang *cooperation* yang meliputi bidang *Agrifood*, *Advanced Manufacturing* dan *Services* yang secara umum hasil dari kerjasama tersebut adalah pembukaan akses pasar yang lebih luas (*greater market access*), pasar yang terintegrasi lebih baik (*better integrated markets*) dan penguatan keterampilan (*enhanced skills*). Khusus terkait SPK, BSN secara intens terlibat dalam penyusunan *Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA* yang dikoordinasikan dengan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional – BAPPENAS. Bersamaan dengan BSN saat ini mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari *Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA*, yaitu:

1. *Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA*
2. *Standards Harmonization Indonesia and Australia in Energy Sectors*

Implementasi perundingan juga dilakukan BSN melalui Direktorat SPSPK berperan aktif dalam kegiatan implementasi Indonesia EFTA CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa. Rekomendasi/Proposal BSN telah diterima dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA untuk dilaksanakan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel dibawah ini.

TABEL 3.22 PROPOSAL YANG DITERIMA DALAM ECCB IEFTA CEPA

No	Tema	Tahun	SDGs Terkait
1.	Technical Assistant for Biology Reference Material Production	2023	 
2.	Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard	2023 - 2025	

Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMDAG, KOMINFO, KEMTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi *Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based, dan Automotives*. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi *Good Regulatory Practices (GRP), International Standard Engagement dan Technical Capacity Building* di bidang *Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement*.

Disamping itu, sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan *Priority Economic Deliverable (PED)* yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul *Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG* ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter teknis yang mendukung implementasi SDGs. Dalam pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMDAG) dan ASEAN secretariat untuk mengusulkan *Concept Note* PED tersebut dan menargetkan penyelesaiannya pada September 2023. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya produk Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek *sustainability* yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Sementara itu, peran aktif BSN dalam *Trade Policy Review (TPR) - WTO* dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.23 PROGRAM TRADE POLICY REVIEW (TPR) TAHUN 2022

No	Negara	Tanggal Diskusi TPR
1	Ghana	21 and 23 June 2022
2	New Zealand	1 and 3 June 2022
3	Switzerland, Liechtenstein,	18 and 20 May 2022
4	Pakistan	30 March and 1 April 2022
5	United Arab Emirates	22 and 24 March 2022
6	Guyana	2 and 4 March 2022
7	Panama	24 and 26 January 2022
8	Georgia	12 and 14 January 2022
9	United States	14 and 16 December 2022
10	Seychelles	5 and 7 December 2022
11	Brazil	23 and 25 November 2022
12	Barbados	25 and 27 October 2022
13	Djibouti	12 and 14 October 2022
14	Mexico	5 and 7 October 2022
15	Moldova, Republic of	20 and 22 July 2022

f. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar (KKPrS)

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan standar, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional. Terdapat 4 (empat) tugas fungsi KKPrS, yaitu:

1. Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional;

3. Mengusulkan program peningkatan penerapan standar; dan
4. Mengusulkan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan infrastruktur pendukung penerapan standar.

Forum KKPrS ini memiliki peran penting untuk membahas isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional. Pada Tahun 2022, Forum menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Kepala BSN untuk dipertimbangkan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian (Lihat tabel 3.24). Capaian untuk kegiatan KKPrS mencapai 100%.

TABEL 3.24 REKOMENDASI KOMITE KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN (KKPRS)

No	Tugas/Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
1	Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Isu-isu terkini (Gender, Sustainability - G20, sektor ekonomi PED ASEAN, silver age)	- Selama ini pengembangan standar lebih mementingkan representasi dari unsur stakeholder yaitu pemerintah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan pakar dan/atau akademisi tanpa ada dominasi dari jumlah dari salah satu unsur pemangku kepentingan. Dari data komite teknis perumusan SNI tahun 2019 diketahui bahwa anggota komite teknis dengan gender perempuan sebanyak 27%, sedangkan	- Kajian mekanisme representasi gender dalam perumusan standar atau perlu dilaksanakan kebijakan responsive gender dan silver age dalam pengembangan standar. - Info pelaksanaan International Standardization Summit G-20. - SNI terkait SDG menjadi salah satu kriteria SDG Award.	- Deputi Pengembangan Standar perlu menyusun kajian mekanisme representasi gender dalam perumusan standar atau perlu melaksanakan kebijakan responsive gender dan silver age dalam pengembangan standar. - Menginformasikan pelaksanaan International Standardization Summit G-20. - Perlu dikaji kemungkinan SNI terkait SDG menjadi salah satu kriteria SDG Award.	BSN-Deputi Pengembangan Standar

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>untuk ketua komite teknis sebanyak 20% dan untuk ekspert dalam keanggotaan komite teknis sebanyak 24%. Hal ini memerlukan mekanisme tersendiri untuk mendorong gender perempuan khususnya untuk dapat terlibat dalam perumusan SNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan International Standardization Summit G-20 pada tahun 2022 dengan Tema Recover Together, Recover Stronger mencakup topik utama yang relevan dengan standar yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Bali secara hybrid. - Bappenas mendorong pemanfaatan SNI dalam SDGs yaitu SNI dapat menjadi salah satu indikator SDGs, SNI juga akan menjadi salah satu kriteria penilaian SDGs Award terutama bagi platform pelaku usaha dan bisnis dan 			

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>SNI juga dapat menjadi penghubung antara pelaksanaan agenda pembangunan dengan pelaku bisnis/industri. Tantangan kedepannya adalah perlunya perencanaan matang untuk penerapan SNI termasuk penyiapan infrastrukturnya. a. Diperlukan masukan dan kolaborasi pembina pada sektor tersebut, serta diperlukan komitmen K/L yang menjadi pengampu kebijakan sektoral dalam pembinaan dan pemberlakuan penerapan SNI, baik dalam rangka perbaikan Tata Kelola Pemerintahan maupun untuk tujuan lainnya (isu Gender, Silver age, SDGs ataupun G20).</p>			
2		Model bimbingan SNI Bina UMK	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak UMK yang belum mengetahui program SNI Bina UMK. - UMK yang telah mendapat pendamping belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kolaborasi program K/L mengenai pembinaan UMK risiko rendah. - Pengembangan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan kolaborasi program dari K/L mengenai pembinaan UMK risiko rendah. - Mengembangkan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - BSN-Dit. PPSPK - BSN-Pusdatin - BSN-Dit. PPSPK

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>merespon dan belum paham dengan kegiatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedang direncanakan adanya blasting whatsapp kepada UMK agar kegiatan bina UMK dapat dipahami dengan jelas oleh UMK. - Jumlah pembina yang terbatas dan kompetensi pendamping, sehingga dibutuhkan infrastruktur berupa peralatan produksi dan ketersediaan LPK untuk menunjang kegiatan sertifikasi produk yang dibina, dan kendala anggaran untuk sosialisasi, pendampingan dan pengujian produk/sertifikasi. 	<p>pembinaan UMK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kebijakan dan program SNI Bina UMK. 	<p>pembinaan UMK dan mensosialisasikan kebijakan dan program SNI Bina UMK.</p>	
3		Koordinasi pelaksanaan bina UMK	Bina UMK berbasis resiko: rendah, menengah, dan tinggi. BSN menetapkan Tanda SNI Bina UMK, yaitu Tanda SNI yang bersamaan dengan terbitnya NIB. UMK dengan Risiko Rendah diberi	- Penyiapan langkah-langkah yang lebih terstruktur terkait bina UMK. Sehingga dapat meminimalisir kejadian 1 pelaku usaha dibina oleh lebih dari 1	- Deputi PSPK akan menyiapkan langkah yang lebih terstruktur untuk meminimalisir adanya duplikasi pembinaan pelaku usaha oleh lebih dari satu instansi.	<ul style="list-style-type: none"> - BSN-Deputi PSPK - ALSI - APRINDO - Toko Mutu

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			kemudahan berupa perizinan tunggal. NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan penerapan SNI oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. SJPH ditindaklanjuti pembinaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.	instansi (untuk efektivitas pembiayaan dari pemerintah). - Rapat dengan APRINDO untuk membahas tindak lanjut setelah bina UMK maupun sertifikasi SNI, agar produk UMK bisa mendapat tempat berjualan dengan akses pasar yang lebih luas dan menjadi pilihan masyarakat.	- Deputi PSPK akan berkolaborasi dengan APRINDO agar produk UMK bisa mendapat tempat berjualan dengan akses pasar yang lebih luas dan menjadi pilihan masyarakat.	
4		Kebijakan pengembangan dan implementasi skema SPK (deklarasi kesesuaian, IndoGAP)	- Untuk tanda Deklarasi Kesesuaian, awalnya terdapat atribut dengan tulisan "UMK" di bawah tanda SNI, namun ada masukan untuk mencantumkan atribut deklarasi kesesuaian menjadi tulisan "UMK-DK" di bawah tanda SNI dikarenakan adanya pelaku usaha yang menggunakan skema sertifikasi dan	Pengembangan skema bagi UMK menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan skema PK melalui sertifikasi LSPRO dan skema deklarasi kesesuaian yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	Direktorat SPSPK menggunakan dua pendekatan dalam pengembangan skema bagi UMK, yaitu dengan skema PK melalui sertifikasi LSPRO dan skema deklarasi kesesuaian yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.	BSN-Dit.SPSPK

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>skema deklarasi kesesuaian sehingga untuk tanda yang diberikan berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkaitan dengan skema IndoGAP, telah dilakukan riviui terkait revisi SNI 8035:2014 menjadi SNI 8035:2019 dan sedang menunggu proses harmonisasi. 			
5		Integrasi data penerap SNI	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya aplikasi data penerap SNI di K/L yang belum terintegrasi sebagai satu big data. - Permasalahan yang muncul dengan banyaknya aplikasi terkait data penerap SNI, antara lain: berulangnya proses penginputan atau pelaporan data-data terkait penerap SNI oleh pelaku usaha maupun Lembaga Sertifikasi, muncul kebingungan masyarakat karena harus mengecek berbagai aplikasi untuk melihat 	Koordinasi dengan seluruh K/L yang memiliki data penerap SNI telah dilakukan, namun masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan setiap K/L untuk memastikan kebutuhan data yang akan diintegrasikan, sehingga memudahkan dalam proses penarikan data penerap SNI.	Mengintegrasikan database penerap SNI di seluruh K/L untuk memudahkan dalam melayani masyarakat dan stakeholder terkait.	BSN-Dit.SPSPK BSN-Pusdatin

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			data penerap SNI, dan sulit mengetahui jumlah data penerap SNI secara total.			
6	Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional	Implementasi hasil MRA ASEAN (elektronik, prepared food stuff, medical devices)	<ul style="list-style-type: none"> - Medical devices diketahui bahwa perkembangannya kurang maju karena saat ini masih dilakukan full ratifikasi ASEAN Medical Devices Directive. Indonesia sudah meratifikasi dan menunggu Brunei Darussalam segera menyampaikan instrumen ratifikasinya. - Berdasarkan study on implementati on of requirements for household food industry, kondisi faktual UMKM di Indonesia masih mempunyai sistem dokumentasi yang kurang baik, pemahaman food safety yang rendah, kurangnya pengendalian untuk bahan mentah, proses produksi dan distribusi. Sehingga dalam 	Pengembangan Framework agreement setiap sectoral bodies di bawah pilar ASEAN	Direktorat SPSPK akan menyusun pengembangan framework agreement setiap sectoral bodies di bawah pilar ASEAN	BSN-Dit.SPSPK

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			kerangka ASEAN - FTA dilakukan kerja sama dengan ACCSQ salah satunya melalui ANZFTA untuk menyepakati beberapa lingkup bantuan yang dapat diberikan kepada UMKM.			
7		Program peningkatan ekspor ke Australia untuk UMK yang telah menerapkan SNI	<ul style="list-style-type: none"> - BSN mengusulkan kepada ECP untuk dapat dimasukkan ke program Empowering Local Stakeholders in Maximizing Benefit of The Implementati on of IACEPA Through Standardizatio n. Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi, penyamaan persepsi antara Indonesia dengan Australia dan awareness pemangku kepentingan terkait. Kemudian identifikasi prioritas dan UMK yang akan menjadi role model, mengidentifik asi hambatan teknis perdagangan yang dihadapi UMK Indonesia dan Australia dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana pilot project kerjasama bilateral IA. - Pengembangan regulasi. - Promosi dan akses pasar. - Empowering Local Stakeholders. - Penyusunan roadmap role model UMK. 	Direktorat SPSPK akan menyusun rencana pilot project kerjasama bilateral IA, mengembangkan regulasi, pengembangan promosi dan akses pasar, empowering local stakeholders, dan penyusunan roadmap role model UMK.	BSN-Dit.SPSPK

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>memasuki pasar, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan stakeholder dan UMK untuk menembus pasar global. Usulan kegiatan ini akan selalu dikoordinasikan dengan Lembaga terkait yaitu Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan - Pengembangan Ekspor FTA Center.</p>			
8		<p>Penanganan hambatan teknis pada negara tujuan ekspor</p>	<p>- Pada tahun 2022 terdapat isu hambatan perdagangan yaitu keberterimaan sertifikat halal Indonesia yang tidak dapat diterima di Saudi Arabia karena adanya persyaratan baru dari Saudi Arabia. Selain itu ada UKM minuman jahe merah yang merupakan binaan BSN yang sudah tersertifikasi SNI produk dan telah menerapkan HACCP yang akan</p>	<p>Penanganan hambatan teknis perdagangan melalui sidang TBT ataupun negosiasi secara bilateral.</p>	<p>Direktorat SPSPK melalui sekretariat TBT WTO melakukan penanganan hambatan teknis perdagangan melalui sidang TBT ataupun negosiasi secara bilateral.</p>	<p>BSN-Dit.SPSPK</p>

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			melakukan ekspor ke USA dan Saudi Arabia, namun masih terkendala karena perusahaan harus memiliki perwakilan di US.			
9	Mengusulkan program peningkatan penerapan standar	Pemberlakuan SNI secara wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebutuhan dari regulator mengenai pemberlakuan SNI secara wajib dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional terkait K3L 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu disusun Program Nasional regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2023 berdasarkan usulan K/L terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pengumpulan usulan regulasi teknis dari regulator - Penyusunan PNRT 2023 - Notifikasi regulasi teknis ke WTO 	BSN-Dit.SPSPK
10	Mengusulkan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan infrastruktur pendukung penerapan standar	Pengembangan infrastruktur mutu di Kawasan Timur Indonesia untuk mendukung daya saing sektor usaha dan produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan LSPro maupun laboratorium pengujian di wilayah Tengah dan Timur Indonesia belum tersedia merata untuk mendukung RPIP. - Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan LPK yang dilakukan BSN yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, yaitu kendala di uji profisiensi serta peralatan di laboratorium uji. - Dibutuhkan SDM yang dapat menyediakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peta infrastruktur mutu perlu ditelaah kembali. Dalam proses pengembangan LPK selain memperhatikan RPIP, orientasi ekspor dan potensi pasar dari UKM yang ada, dapat dilakukan pendekatan-pendekatan seperti yang dilakukan BPJPH dalam mendukung ketersediaan LPK. - Memperkuat jejaring laboratorium dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan peta infrastruktur mutu. - Memperkuat jejaring Lembaga Penilaian Kesesuaian. 	BSN-Dit.PPSPK

No	Tugas/ Fungsi KKPrS	Isu/Topik	Permasalahan	Rekomendasi KKPrS	Rencana Tindak Lanjut	PIC
			<p>dan memfasilitasi GAP yang ada, dibutuhkan kebijakan untuk menutupi GAP tersebut. BSN telah melakukan audiensi ke beberapa provinsi dimana Pemda juga diminta memperhatikan ketersediaan infrastruktur dengan perencanaan yang jelas serta dukungan anggaran untuk penyediaan LPK di daerah.</p>	<p>berkoordinasi antara BSN dan KAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat dengan ALSI untuk memperkuat peran LPK. - Meminta Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengkoordinir K/L dalam pengembangan LPK sesuai dengan ruang lingkungannya. Daerah perbatasan selain wilayah Tengah dan Timur harus diperhatikan ketersediaannya LPK-nya. - Aplikasi yang dapat disediakan untuk mengakomodasi data lab di Indonesia tidak hanya yang sudah diakreditasi KAN namun semua data lab di Pemerintah Daerah maupun di Universitas. 		

g. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)

KKPPK telah memberikan 4 tanggapan pada sekretariat IECEE pada tahun 2022.

1. Tanggapan pertama berupa usulan untuk mengurangi biaya iuran IECEE tahun 2023 untuk Member Body dari CHF 2.400.00 menjadi CHF 2.000.00 dikarenakan pemerintah Indonesia memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi.
2. Tanggapan kedua terkait IECEE-CMC/2401/DV mengenai Global Impact Fund. Global Impact Fund (GIF) merupakan usulan rencana strategis IEC untuk mendukung pelaksanaan kerja IEC untuk mengatasi tantangan global. Sesuai dengan Operational Rules yang telah disetujui, UKM akan diberikan hibah untuk mengatasi tantangan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) seperti limbah elektronik, akses energi, efisiensi energi atau perubahan iklim dengan menerapkan Standar Internasional IEC dan/atau Sistem Penilaian Kesesuaian IEC di Negara tertentu. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, IEC Board memutuskan untuk meluncurkan IEC Global Impact Fund melalui donasi tahunan sebesar 1% dari Modal & Cadangan IEC selama tiga tahun fase percontohan. Jumlah tersebut akan dipindahkan ke cadangan khusus dan akan tercermin dalam akun 2022. Pada prinsipnya, kontribusi 1% juga akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. Perlu dicatat bahwa IEC Board menyetujui alokasi untuk seluruh IEC, termasuk Sistem CA IEC, yang akan didiskusikan dalam Komite Manajemen masing-masing. Oleh karena itu, keputusan IEC Board untuk meluncurkan GIF memberikan kontribusi dari sistem IEC CA termasuk IECEE dari 1% dari Modal & Cadangan per tahun selama tiga tahun (2022-2024), dengan IECEE CMC direkomendasikan untuk mendukung hal ini. Hasil tanggapan menyetujui dokumen IECEE-CMC/2401/DV. Rekomendasi ini dibuat dengan pertimbangan bahwa *Global Impact Fund* diharapkan mempunyai manfaat bagi IECEE untuk memperkuat visibilitas IECEE, membantu IECEE dikenal di wilayah baru, dan membangun hubungan baru dan berpotensi menjalin kemitraan strategis baru. Namun, Sekretariat IECEE harus mengirimkan laporan penggunaan dana tersebut kepada semua Member Body dan menyusun suatu dokumen yang menyatakan kriteria small medium enterprises yang mendapatkan funding.
3. Tanggapan ketiga adalah penyampaian dukungan atas pembuatan TF (*Task Force*) "SMART" sesuai dokumen IECEE-CMC/2408/DV. "SMART" adalah

program bersama antara International Electrotechnical Commission (IEC) dan ISO, "SMART" mengacu pada format, proses, dan alat yang diperlukan bagi pengguna (*human and technology-based*) untuk berinteraksi dengan standar. Solusi digital ini melayani kebutuhan semua pemangku kepentingan, mulai dari industri, regulator, dan pengguna akhir hingga masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung kerja SMART CA (*conformity assessment*) Group, sekretariat IECEE meminta persetujuan *Member Bodies* IECEE untuk menyetujui pembuatan TF "SMART". Hasil tanggapan menyetujui pembuatan TF (*Task Force*) "SMART" guna mengikuti dan mengevaluasi kerja JCG (*Joint Coordination Group* antara IEC SMART TF dan ISO SMART-SG) dalam kaitannya dengan SMART Standards dan CA, dan mengembangkan pandangan IECEE tentang aktivitas SMART yang sedang berlangsung.

4. Tanggapan keempat, Terkait informasi dari sekretariat IECEE mengenai adanya perubahan sistem penagihan. Agar transfer tagihan dapat berjalan dengan lancar dan agar sistem baru IECEE selalu terbaru. IECEE meminta konfirmasi kepada MB, kepada siapa faktur luran Tahunan harus ditujukan. Sebagai catatan bahwa untuk invoice dalam bentuk (.pdf) dan terdapat satu nama yang dapat muncul di invoice. Namun IECEE akan dapat mengirim email dengan faktur ke orang yang berbeda. Tanggapan dilakukan dengan penyampaian informasi kepada Sekretariat IECEE untuk nama pada invoice adalah Bapak Zul Amri dari Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi BSN, dan tagihan dapat ditujukan ke email kerj_int@bsn.go.id dan zul@bsn.go.id, (cc) cbscheme@bsn.go.id, sekre.dir.spspk@bsn.go.id, aries@bsn.go.id, serta deni.darmawan@bsn.go.id. Hal tersebut sebagai antisipasi dan update sistem penagihan terbaru dari IECEE yang perlu disampaikan oleh seluruh *member body*.

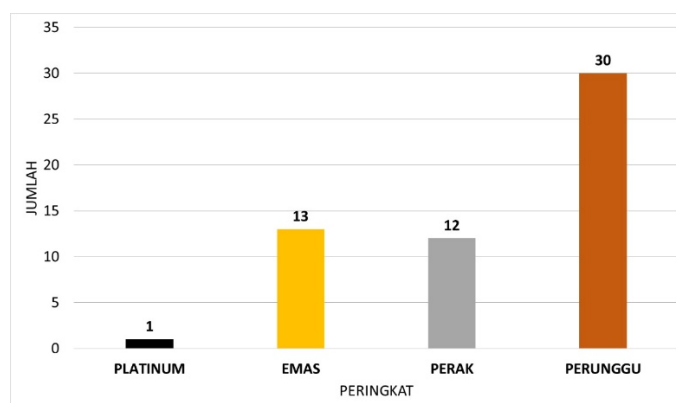
h. Rekomendasi Apresiasi Kepada Organisasi yang Konsisten Dalam Menerapkan SNI, Berkinerja Unggul dan Berkelanjutan.

Apresiasi tertinggi kepada organisasi organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten dan memiliki kinerja unggul dan berkelanjutan diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia skala nasional melalui BSN dalam bentuk penganugerahan SNI

Award. Framework penilaian SNI award didasarkan pada 7 (tujuh) kriteria yaitu (1) kepemimpinan; (2) Strategi; (3) Focus kepada pelanggan; (4) Manajemen sumberdaya; (5) operasi; (6) Pengukuran, analisis dan peningkatan kinerja; (7) hasil bisnis. Penghargaan diberikan atas dasar hasil reviu proses (kriteria 1s.d 6) dengan pendekatan *approach, deployment, learning dan integration* (ADLI) dan reviu hasil bisnis (kriteria 7) dengan pendekatan *Level, Tren, Comparion and Integration* (LeTCI).

Tahun 2022 merupakan penganugerahan SNI award ke-17 dimana Dewan Juri SNI Award yang beranggotakan 20 orang ahli di bidangnya merekomendasikan untuk memberikan penghargaan kepada 56 organisasi (1 level platinum, 13 level emas, 12 level perak dan 30 level perunggu) pada 12 kategori yaitu:

1. Organisasi skala besar barang sektor kimia, farmasi, tekstil dan pertambangan
2. Organisasi skala besar barang sektor logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
3. Organisasi skala besar sektor agro
4. Organisasi skala besar sektor jasa
5. Organisasi skala menengah barang sektor kimia, farmasi, tekstil dan pertambangan
6. Organisasi skala menengah barang sektor logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
7. Organisasi skala menengah sektor agro
8. Organisasi skala menengah sektor jasa
9. Organisasi skala kecil sektor Barang
10. Organisasi skala kecil sektor jasa
11. Organisasi Pendidikan tinggi
12. Organisasi Pendidikan menengah.



GAMBAR 3.12 JUMLAH ORGANISASI PENERIMA SNI AWARD DENGAN PERINGKAT PENGHARGAAN

Kebijakan penting lain dalam pelaksanaan SNI award ke - 17 adalah *remote evaluation*, pelaksanaan penilaian desk evaluasi dan site evaluasi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Pelaksanaan kegiatan *remote evaluation* mengacu Panduan Pelaksanaan Evaluasi SNI Award Jarak Jauh.

SASARAN 3

Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L

TABEL 3.25 CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	41.02	50	50	100	60	83

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase SNI yang

diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK. Perhitungan presentase berdasarkan rumus berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang telah diterapkan}}{\Sigma \text{ Total SNI yang berlaku}} \times 100\%$$

- **SNI yang diterapkan** adalah SNI barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan SNI terkait Penilaian kesesuaian
- **Penerapan SNI** adalah kegiatan menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal dengan mempertimbangkan sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN
- **Jumlah SNI terkait** barang, jasa, proses, dan sistem, personal dan penilaian kesesuaian yang berlaku (aktif) sebanyak 9336 SNI, SNI yang diterapkan sebanyak 4703, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah 50%.
- **Perbandingan target kinerja 50% SNI diterapkan dengan capaian kinerja yaitu 100%**

TABEL 3.26 JUMLAH SNI YANG DITERAPKAN

No	SNI	Jumlah	Diterapkan	%
1	Barang/Jasa/Sistem/Proses/personel	6936	2461	35,5
2	Sistem manajemen dan Penilaian Kesesuaian	2461	2242	91,1
	Jumlah Total	9397	4703	50

Berdasarkan hasil capaian, beberapa upaya sudah dilakukan oleh BSN agar SNI yang ditetapkan BSN dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain diseminasi SNI yang terus menerus dan masif kepada pelaku usaha, mengkomunikasikan kebutuhan SNI kepada produsen atau pelaku usaha lain, sehingga SNI yang ditetapkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk peningkatan kinerja ke depan, BSN akan meningkatkan kegiatan pembinaan penerapan SNI, melalui program SNI Bina UMK berbasis OSS yang diharapkan akan semakin banyak SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terus secara gencar melakukan diseminasi, edukasi dan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan SNI di kalangan usaha. Meskipun di masa pasca pandemi, pelaksanaan diseminasi dan promosi SPK juga tetap gencar baik melalui kegiatan sosialisasi, webinar, podcast dan media sosial dan pemanfaatan ICT,

Ketersediaan LPK yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan kebutuhan penilaian produk UMKM dan produk unggulan daerah menjadi sangat penting untuk percepatan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan reduksi pembiayaan. Untuk itu Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan fasilitasi peningkatan ruang lingkup LPK di beberapa wilayah Indonesia terutama Bagian Timur Indonesia.

Adapun pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik untuk SNI sistem, personel, barang, jasa dan proses. Pada tahun 2021, jumlah penerap produk, sistem, personel, jasa, dan proses sesuai dengan SNI berjumlah 39.048 organisasi sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99.266 organisasi. Berikut adalah grafik terkait perkembangan jumlah penerap SNI pada tahun 2016 – 2022.



GAMBAR 3.13 PERTUMBUHAN JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI DARI TAHUN 2016-2022

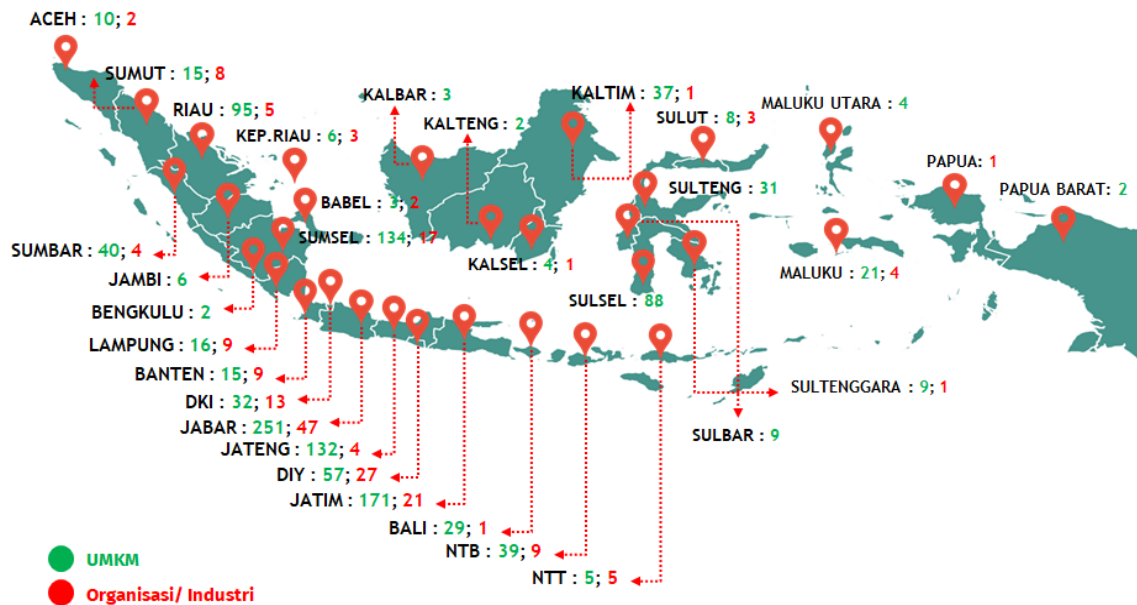
Gambar 3.13 memperlihatkan kenaikan penerapan SNI secara signifikan penerap SNI sebesar 154%. Jika dilihat dari ragam SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha, terdapat 23 kategori SNI yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Peningkatan jumlah penerap SNI terbanyak yaitu pada SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyipuan yaitu sebesar 419 pelaku usaha. Secara detail jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi disajikan di dalam Tabel 3.27.

TABEL 3.27 JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI SESUAI DENGAN SKEMA AKREDITASI KAN

No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221	10.345	10474	10782
2	Penerap standar pertanian organik	355	319	288	316	596	567	584
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270	10.300	14972	76
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944	804	831	1134
5	Penerap pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	223	251	288	288	289
6	Penerap standar ekolabel	7	7	9	8	9	9	9
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5	5	4	6
8	Penerap standar Sistem Manajemen Energi	-	-	6	57	35	35	36
9	Penerap standar Verifikasi Legalitas Kayu	-	-	2257	2941	3.047	3.051	3.143
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714	4.635	4.473	4.588
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380	235	288	321
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225	244	244	272
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163	386	420	605
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33	36	40	19
15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96	255	360	779
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2	5	5	5
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801	1.279	2.572	2.649
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1	1	2	4
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71	51	62	62
20	Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh	-	-	-	-	172	364	422
21	Penerap Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	-	-	-	-	-	3	17
22	Penerap Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)	-	-	-	-	-	736	758
23	Penerap standar untuk Personel	-	-	-	-	-	-	72706
TOTAL		10.108	10.353	13.819	19.398	32.728	39.048	99.266

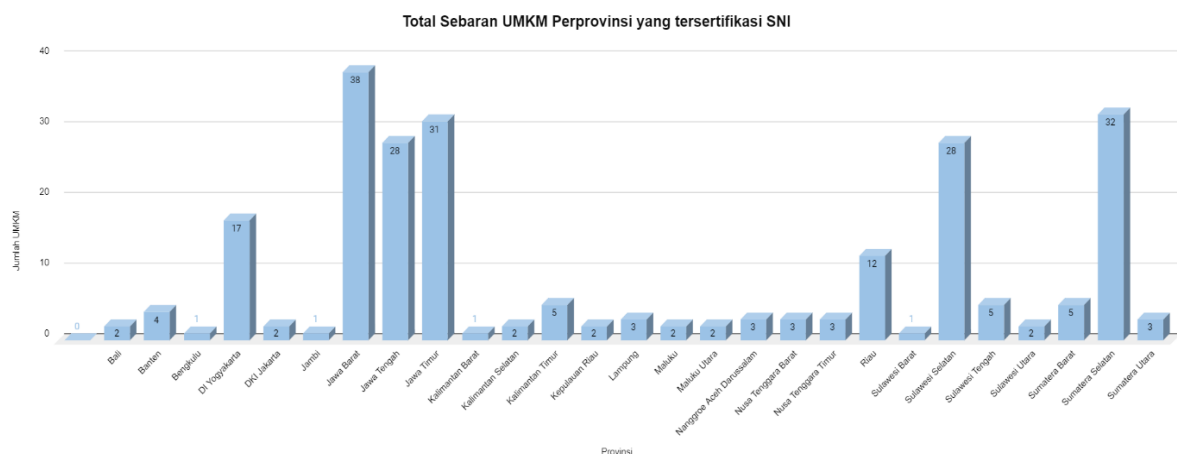
Meningkatnya jumlah organisasi penerap SNI, merupakan salah satu bentuk nyata dari kegiatan yang dilakukan di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Sesuai dengan amanah UU No 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat. Setiap tahun para pelaku usaha baik itu organisasi maupun usaha mikro kecil yang mendapatkan pembinaan penerapan SNI semakin meningkat jumlahnya. Selain itu kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan SNI juga semakin meningkat. Gambar 3.14 menunjukkan peta sebaran jumlah pembinaan

penerapan SNI pelaku usaha UMKM maupun organisasi/ industri Tahun 2022 yang tersebar di 32 Provinsi.



GAMBAR 3.14 PETA SEBARAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI BAGI UMKM DAN ORGANISASI/ INDUSTRI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Adapun Sebaran UMKM Perprovinsi yang tersertifikasi SNI digambarkan pada Gambar 3.15.



GAMBAR 3.15 TOTAL SEBARAN UMKM PER-PROVINSI YANG TERSERTIFIKASI SNI

Selain peningkatan kegiatan pendampingan penerapan SNI kepada para pelaku usaha, dilakukan kegiatan diseminasi dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terutama di daerah luar Jawa dan wilayah Indonesia bagian Timur, yang masih sangat terbatas. Pelaksanaan fasilitasi LPK bermitra dengan Kementerian, Lembaga di pusat dan daerah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Angkatan Darat, POLRI, BSSN, PLN, Unit pelaksana teknis daerah, perguruan tinggi dan swasta. Adapun SNI yang diterapkan dalam proses pembinaan LPK tersebut meliputi SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO/IEC 17021-1:2015, SNI ISO/IEC 17029:2019.



GAMBAR 3.16 PETA SEBARAN FASILITASI LPK TH 2022

Tabel 3.28 merupakan rincian Laboratorium pengujian dan Laboratorium kalibrasi yang difasilitasi selama tahun 2022.

TABEL 3.28 LABORATORIUM YANG DIFASILITASI

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
1	UPN Veteran Yogyakarta	LP	Batu Bara

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
2	Poltekkes Kemenkes Ternate	LP	Air bersih dan Air permukaan
3	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	LP	Air Bersih, Air minum dan Air Limbah
4	UPTD BPMKP Provinsi Lampung	LP	Beras
5	BPMJB Dinas PUPR Prov. Gorontalo	LP	Konstruksi Bahan dan Jalan
6	FKIK Universitas Warmadewa	LP	Biologi Molekuler
7	Poltekkes Kemenkes Medan	LP	Lingkungan dan Pangan
8	Poltekkes Kemenkes Semarang	LP	Radiologi
9	Poltekkes Kemenkes Bandung	LP	Air Untuk Keperluan Sanitasi dan Hygiene
10	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	LP	Air Untuk Keperluan Sanitasi dan Hygiene
11	Poltekkes Kemenkes Surabaya	LP	Air dan Daging
12	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	LP	Air Bersih dan Udara
13	Poltekkes Kemenkes Malang	LP	Uji Proksimat pada makanan
14	Poltekkes Kemenkes Manado	LP	Air bersih dan Air Limbah
15	Puslitbang Mabes POLRI	LP	Senjata dan alat Pelindung diri
16	BPSMB Prov. Maluku Utara	LP	Lada dan Pala
17	Lapalkes Puskes AD	LK	Alat Kesehatan

Rincian Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi yang difasilitasi selama tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 3.29.

TABEL 3.29 LEMBAGA SERTIFIKASI/LEMBAGA INSPEKSI YANG DIFASILITASI

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
1	BPSMB Prov. Aceh	LSPro	Bubuk Kopi, AMDK

No	Nama Lembaga	Skema	Ruang Lingkup
2	BPSMB Prov. Jambi	LSPro	SIR, AMDK, Kopi Instan dan Biji Kopi
3	Badan Siber dan Sandi Negara	LSPro	Modul Sandi dan Keamanan Perangkat Teknologi Informasi
4	BPPI – Kementerian Kelautan dan Perikanan	LSPro	Benang Polyamide (PA) monofilament untuk alat Penangkapan
5	BPSMB Prov. Kalimantan Timur	LSPro	Pasar Rakyat
6	BPSMB Prov. Kalimantan Selatan	LSPro	SIR
7	BPSMB Prov. Kalimantan Barat	LSPro	SIR, Pasar Rakyat
8	BPSMB Prov. Bali	LSPro	Pasar Rakyat
9	BPSMB Prov. Kalimantan Tengah	LSPro	SIR
10	UPT PSHP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur	LSO	Tanaman segar dan produk tanaman; Produk khusus
11	Balai Besar Karet Kulit dan Plastik Yogyakarta	LI	Lingkungan Kerja industri karet, kulit dan plastik untuk (1) Pencahayaan, (2) Nilai Ambang Batas Iklim Indeks Suhu Basah dan (ISBB), (3) Kebisingan, (4) Getaran, (5) Partikulat, (6) Kebauan.
12	PT SKI	LSBU	Jasa Konstruksi
13	PT Inkindo	LSBU	Jasa Konstruksi
14	PT BMR	LSBU	Jasa Konstruksi
15	BBSPJIHPMM Makassar	LSSM	Alsintan
16	PT PLN Pusertif	LVV GRK	Gas Rumah Kaca

Selain itu, terdapat 5 lembaga penilaian kesesuaian yang telah dibimbing yang kemudian mendapat akreditasi dari KAN. Kelima lembaga tersebut adalah

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi (LSPr-085-IDN)
2. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (LSPr-087-IDN)

3. UPT PSMB Provinsi Sulawesi Tengah (LSPr-131-IDN)
4. Pusat Laboratorium Narkotika BNN (PUP-033-IDN)
5. Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Padang (LP-1641-IDN)

Sebagai informasi pada Tahun 2022 juga terdapat 9 Lembaga penilaian kesesuaian yang saat ini sedang dalam proses akreditasi KAN. LPK tersebut diantaranya:

1. Laboratorium pengujian Puslitbang Polri
2. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Kupang
3. Laboratorium Terpadu Poltekes Kemenkes Semarang
4. Laboratorium pengujian BPMJB Gorontalo
5. Laboratorium kalibrasi Lapalkes Puskes AD
6. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Timur
7. Lembaga Sertifikasi Organik Jawa Tengah
8. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Inkindo
9. Lembaga Sertifikasi PT SKI

Dalam rangka meningkatkan keberterimaan LPK sektor kelistrikan di ASEAN, direktorat PPSPK juga melakukan *listing* terhadap laboratorium dan Lembaga sertifikasi produk sebagaimana tercantum pada tabel 3.30 berikut

TABEL 3.30 RUANG LINGKUP LISTING LPK INDONESIA

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Lembaga Sertifikasi Produk (Certification Body)					
1.	PPMB	6 Maret 2019 – 5 Maret 2022	4 September 2022	Proses re-akreditasi	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Vietnam
2.	Sucofindo ICS	23 September 2020 – 22 September 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
3.	PT Qualis Indonesia	17 Desember 2019 - 16 Desember 2022	15 Juni 2023	Masa kontestasi	Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021 – 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam
5.	TUV Nord Indonesia	Pengajuan baru		Kontestasi dengan Thailand	

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Kondisi Terupdate	Negara Tujuan Listing
Laboratorium Penguji (Testing Laboratory)					
1.	BPMB	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
2.	B4T	12 Februari 2019 11 Februari 2022	10 Agustus 2022	Proses analisis listing regulasi negara tujuan	
3.	PT. Sucofindo Laboratory	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023			Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
4.	PT. UL International Indonesia	15 Maret 2021 – 14 Maret 2024			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
5.	PT. Qualis Indonesia	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

6.	PT. Hartono Istana Teknologi	5 April 2022 – 4 April 2025			Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
----	------------------------------	-----------------------------	--	--	--

SASARAN 4

Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal

TABEL 3.31 CAPAIAN KINERJA SASARAN 4

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian s.d 2024(kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Rata rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di instansi pemerintah	Rata rata tingkat maturitas	2,1	2,2	2,2	100	2,5	88

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks penerapan tata kelola SPK sebesar 100 %. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, yang menjadi landasan penerapan SPK bagi kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektor dan regulasi di masing-masing sektor, termasuk dalam kerangka penerapan dan pelayanan SPK oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan terbaik dalam penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, yang bertujuan untuk memastikan Kementerian/Lembaga/stakeholder untuk menerapkan kegiatan SPK secara efektif dan efisien sesuai tata kelola SPK di sektornya masing masing. Dalam rencana strategis BSN tahun 2020-2024, tata kelola SPK ditetapkan sebagai strategi ke-3 yang

bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh. Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK di K/L sesuai dengan ketentuan, lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap SPK serta penguatan infrastruktur mutu.

4 (empat) elemen utama dalam Tata kelola SPK yang membentuk rantai nilai SPK sehingga dapat dilihat tingkat maturitas penerapan SPK di K/L, yaitu elemen pengembangan standar, elemen penerapan SPK, elemen akreditasi dan ketertelusuran pengukuran, dan elemen *learning and growth*. Untuk membantu pelaksanaan tata kelola SPK di K/L atau oleh *stakeholder* berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat diagnostik tingkat maturitas tata kelola SPK di K/L. Isi panduan memuat elemen, diantaranya:

TABEL 3.32 ELEMEN DAN SUB ELEMEN EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA SPK

Elemen	Sub elemen
Pengembangan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Pengembangan standar regional/ internasional 3. Perumusan SNI 4. Pemeliharaan SNI
Penerapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Perencanaan Strategis 2. Penerapan Sukarela 3. Penerapan Wajib 4. Fasilitasi Penerapan Standar
<i>Learning and Growth</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia SPK 2. Organisasi SPK 3. Sistem Informasi SPK
Penilaian Kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Penggunaan LPK yang diakreditasi oleh KAN 3. Pengembangan LPK 4. Saling Pengakuan/MRA 5. Ketertelusuran Pengukuran

Kegiatan Tata kelola SPK pada tahun 2022 diantaranya sbb:

1. Koordinasi dan kelengkapan untuk penilaian mandiri lokus lama Tahun 2021;
2. Identifikasi, sosialisasi dan pembimbingan pengisian kriteria dan indikator penilaian tata Kelola SPK pada lokus baru Tahun 2022;
3. Pelaksanaan FGD Evaluator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan pembobotan indeks maturitas tata Kelola SPK;
4. Pelaksanaan verifikasi penerapan tata kelola SPK pada organisasi pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian;
5. Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan indeks maturitas tata Kelola SPK dan feedback berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat;
6. Penyampaian penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN);
7. Audiensi dan Diskusi tindak lanjut feedback tata kelola SPK untuk Pemprov Jabar yang diwakili oleh 4 OPD terkait dengan kegiatan SPK.

Verifikasi penilaian tata kelola SPK pada tahun 2022 dilakukan terhadap 15 lokus organisasi pemerintah sebagaimana tabel 3.33.

TABEL 3.33 LOKUS ORGANISASI PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA SPK

Organisasi	<i>Pilot Project</i> Tahun 2020	Tahun 2021-2022	Tahun 2022
Pemerintah Pusat	Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan: - Ketenagalistrikan - Mineral dan Batubara - Baru Terbarukan - Minyak dan Gas Bumi 2. Dit. Konservasi Energi 3. Dit. Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 2. Dit, Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 2. Dit, Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara

Organisasi	Pilot Project Tahun 2020	Tahun 2021-2022	Tahun 2022	
	Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	Kementerin PUPR 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber Daya Air 3. Bina dan Teknik Permukiman dan Perumahan	Kementerian PUPR 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber Daya Air	Kementerian PUPR 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber Daya Air	
	Kementerian Perindustrian Pusat Standardisasi Industri	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu	
			BIG Dit. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	BIG Dit. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
			Badan Riset dan Inovasi Nasional PRTKMMN (PSMN-ex Batan)	Badan Riset dan Inovasi Nasional PRTKMMN (PSMN-ex Batan)
			BSSN (tidak melanjutkan verifikasi)	-
	Pemerintah Daerah	Pemprov Jawa Barat, 11 OPD dari 5 Dinas:	Pemprov Jawa Barat Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemkot Surakarta

Organisasi	Pilot Project Tahun 2020	Tahun 2021-2022	Tahun 2022
	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Dinas Kehutanan	Pemprov Jawa Timur 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas PU-SDA 4. Dinas PU Bina Marga 5. Dinas Sosial	Pemkab Purbalingga (tidak menyampaikan isian kuesioner)
		Pemprov Sulawesi Selatan 1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemprov Sulawesi Selatan 1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemprov Sumatera Selatan Dinas Perindustrian	Pemprov Sumatera Selatan Dinas Perindustrian
		Pemprov Sumatera Barat 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemprov Sumatera Barat 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pemprov Riau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Pemprov Riau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Verifikasi dilakukan terhadap 15 organisasi dan disampaikan hasil penilaian evaluasi tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional Tahun 2022 di Palembang. Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2022 sebagaimana tabel terlampir.

TABEL 3.34 REKAPITULASI INDEKS MATURITAS TATA KELOLA SPK

Organisasi Pemerintah	Tahun 2022	
	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah
K/L	2,2	8
Pemerintah Daerah	1,6	7

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 2 yaitu Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) mencapai tingkat maturitas minimal 2,2 tercapai 100 %. Sementara untuk tingkat maturitas SPK Pemerintah Daerah (*pilot project*) masih memerlukan *awareness* yang lebih instensif. Menindaklanjuti kegiatan tata Kelola SPK yang telah dilakukan sejak *pilot project* Tahun 2020 sd Tahun 2022, dilakukan audiensi dan diskusi tindaklanjut secara fisik pertama kali pada 9 Desember 2022 terhadap perkembangan dan implementasi tata Kelola SPK di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil audiensi dan evaluasi terhadap kuesioner secara langsung memberikan hasil efektif dan dapat menangkap kondisi SPK dan kebutuhan SPK di daerah yang mendorong pencapaian tujuan nasional. Rekomendasi pelaksanaan evaluasi penerapan tata Kelola SPK ditahun selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara fisik khususnya untuk Pemerintah Daerah dan dibutuhkan dukungan sumber daya dalam mendukung pencapaian target Renstra.

TABEL 3.35 CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
Predikat akuntabilitas Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	75,64	72 nilai (BB)	78,95	109,7%		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Predikat akuntabilitas Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebesar 109,7 % yang terealisasi 78,95 dari target 72. Upaya BSN dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) komponen Pengungkit dan 3 (tiga) komponen hasil telah dilakukan maksimal ini terlihat dari capaian periode Renstra 2015 – 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tiap pelaksanaan butir komponen penilaian.

Untuk penilaian pada penguatan akuntabilitas BSN di Deputi bidang Penguatan dan Penerapan Standar telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai rencana aksi antara lain:

1. *Reviu Penyusunan Renstra Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024*
2. *Reviu IKU Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024*
3. *Penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya untuk tahun 2021*
4. *Implementasi e-performance*
5. *Reward dan Punishment*

6. Inovasi dalam layanan di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk memudahkan stakeholder
7. Penyederhanaan program, kegiatan dan output kegiatan BSN

Diawal tahun 2022 penilaian akuntabilitas dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014. Namun saat penilaian acuan yang digunakan adalah Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020. Hasil penguatan akuntabilitas kinerja yang diperoleh sebesar 78,95 dengan hasil BB.

Untuk terwujudnya Indikator Kinerja Utama Predikat akuntabilitas Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun mendatang, perlu merencanakan program yang matang sesuai dengan tujuan program, merealisasikan kegiatan di dua direktorat sesuai dengan perencanaan dengan basis money follow program, melakukan efisiensi dalam setiap pelaksanaan anggaran dengan berorientasi pada output dan outcome, Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu, melakukan monev melalui *e-performance* yang menjadi bahan untuk perbaikan kinerja setiap bulan dan triwulannya dan melakukan inovasi dalam kegiatannya

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 23 November 2022 Rp. 9.661.155.000,- dimana terdapat anggaran yang diblokir sebanyak Rp. 2.192.450.000,- sehingga pagu anggaran setelah blokir adalah Rp. 7.468.705.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 7.359.597.504,- atau 98,54%.

TABEL 3.36 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TA 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2022		%
		Pagu setelah blokir	Realisasi	
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.855.318.000	1.847.688.655	99,59
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5.613.387.000	5.511.908.849	98,14
	Total	7.468.705.000	7.359.597.504	98,54

Analisis Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi dan efektivitas sumber daya antara lain:

1. Efisiensi dalam melakukan kegiatan rapat dan rapat pembahasan lainnya dilakukan dengan teleworking, memanfaatkan teknologi informasi dengan online meeting, sehingga mengurangi biaya bahan, belanja perjalanan, biaya akomodasi dan belanja narasumber,
2. Efisiensi dalam menghadiri sidang dan pertemuan internasional, serta melakukan rapat kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan kegiatan sosialisasi secara hybrid sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber,
3. Melakukan peningkatan layanan berbasis digital sebagai contoh peningkatan layanan SPPT SNI dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Efisiensi dalam melakukan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi, pelaku UMKM dan industri, serta Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga dilakukan dengan virtual tanpa perlu biaya akomodasi dan transportasi.
5. Efisiensi dalam melakukan diseminasi SPK dengan menggunakan virtual meeting dan partnership dengan berbagai pihak untuk menekan biaya penyelenggaraan acara.

6. Membuat materi promosi dan panduan penerapan SNI kepada pelaku usaha dalam bentuk digital sehingga tidak perlu ada biaya pencetakan.
7. Melakukan partnership dengan berbagai institusi Pembina UMKM seperti Bank Indonesia, BUMN dan stakeholder lain sehingga biaya sertifikasi SNI kepada UMK bersumber dari mitra BSN.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu seluruh capaian terealisasi 100% dengan rerata capaian sebesar 113,5 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kontribusi yang besar dalam mencapai visi misi BSN dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Meskipun pada tahun 2022, BSN mengalami kebijakan *Automatic Adjustment* untuk penanganan pasca pandemic dan IKN, namun capaian pembinaan penerapan SNI di Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengalami kenaikan, dan melebihi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kolaborasi yang baik dengan mitra standardisasi, baik dengan Kementerian, Bank Indonesia, BUMN, Dinas dan perguruan tinggi. Di samping itu, pembinaan penerapan SNI juga sudah melibatkan pembina eksternal yang ada di beberapa daerah, sehingga kegiatan pendampingan penerapan SNI lebih efisien.

Kedepan, Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu terus meningkatkan kinerjanya agar capaian 100% dapat dipertahankan dan dapat lebih baik lagi. Untuk itu dengan kerja sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan penerapan SNI dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk, Deputy Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan terus membumikan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kukuh S. Achmad

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama

Zakiyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1 Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	1 Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	60	%
2 Memastikan Kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	2 Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	75	%
	3 Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	86	%
3 Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	4 Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	50	%
4 Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	5 Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	2,2	Rata-rata tingkat maturitas
5 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	6 Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	72	Nilai

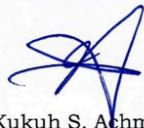
Program

1 Program Standardisasi Nasional

Anggaran (Rp.)

9.291.155.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama



Zakiyah,

LAMPIRAN II

DATA MASA TRANSISI SNI REVISI TAHUN 2022

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
1	SNI ISO 11737-2:2019 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 2: DEFINISI, VALIDASI DAN MEMPERTAHAKAN PROSES STERILISASI UNTUK UJI STERILITAS	SNI ISO 11737-2:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI – BAGIAN 2: UJI STERILITAS YANG DILAKUKAN DALAM VALIDASI PROSES STERILISASI	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
2	SNI ISO 11737-1:2018 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 1: PENENTUAN POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK	SNI ISO 11737-1:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI – BAGIAN 1: PENENTUAN DARI POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
3	SNI 2856:2021 KAPORIT (KALSIMUM HIPOKLORIT)	SNI 06-2856-1998 KAPORIT (KALSIMUM HIPOKLORIT)	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2024
4	SNI ISO 5398-3: 2018 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN CARA SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM	SNI ISO 5398-3: 2013 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
5	SNI ISO 5398-1: 2018 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI	SNI ISO 5398-1: 2013 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI DAN SNI 06-0645-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR KROM OKSIDA	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
6	SNI 7188-1-3:2021 KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS – SEKSI 3: KERTAS CETAK DAN KERTAS MULTIGUNA	SNI 7188.1.3-2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS - SEKSI 3: KERTAS CETAK TANPA SALUT DAN KERTAS MULTIGUNA	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
7	SNI 8403:2021 KERTAS KONTINU	SNI 8403:2017 KERTAS KOMPUTER KONTINU	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
8	SNI 8995:2021 METODE PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR UNTUK PENGUJIAN FISIKA DAN KIMIA	SNI 06-6989.57:2008 AIR DAN AIR LIMBAH – BAGIAN 57: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN DAN SNI 06-6989.58:2008 AIR DAN AIR LIMBAH – BAGIAN 58: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR TANAH	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
9	SNI ISO 7405:2018 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI BIOKOMPATIBILITAS ALAT KESEHATAN YANG DIGUNAKAN DI BIDANG KEDOKTERAN GIGI	SNI ISO/TS 22911:2016 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI PREKLINIK DARI SISTEM IMPLAN GIGI - METODE UJI HEWAN	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
10	SNI ISO 4049:2019 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER	SNI ISO 4049:2009 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
11	SNI 7186:2021 PENGUKURAN DAN EVALUASI PAPARAN GETARAN PADA SELURUH TUBUH PEKERJA	SNI 7186:2009 METODE PENGUKURAN PERCEPATAN GETARAN SELURUH TUBUH PADA SIKAP KERJA DUDUK	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2023
12	SNI IEC 62244:2019 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -PORTAL MONITOR RADIASI (PMR) TERPASANG UNTUK DETEKSIPERPINDAHAN TIDAK SAH BAHAN NUKLIR DAN RADIOAKTIF	IEC 62244:2016 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -MONITOR RADIASI YANG TERPASANG UNTUK DETEKSI BAHAN NUKLIR KHUSUS DAN RADIOAKTIF DI PERBATASAN WILAYAH	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
13	SNI 6372:2021 STANDAR UNTUK PENGONDISIAN KELEMBAPAN KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU	SNI 03-6372-2000 TATA CARA PENGONDISIAN KELENGAS KAYU DAN BAHAN BERKAYU		Pencabutan SNI lama
14	SNI 6850:2021 METODE UJI UNTUK PENGUKURAN KADAR AIR LANGSUNG DARI KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU	SNI 03-6850-2000 METODE PENGUJIAN PENGUKURAN KADAR AIR KAYU DAN BAHAN BERKAYU		Pencabutan SNI lama

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
15	SNI ISO 5894:20:8 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN - LUBANG LALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT	SNI ISO 5894:2011 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN - LUBANG LALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
16	SNI 9009:2021 KOMPONEN PERALATAN PERANGKAI MEKANIK SARANA PERKERETA APIAN	SNI 11-1649-1989 ALAT PERANGKAI OTOMATIS UNTUK KERETA DAN SNI 11-1648-1989 ALAT PERANGKAI OTOMATIS UNTUK GERBONG		Disepakati untuk abolisi berdasarkan rapat kaji ulang tgl 17 Sept 2021 dan menjadi tanggung jawab Dit. MEETI
17	SNI IEC 31010:2019 MANAJEMEN RISIKO — TEKNIK PENILAIAN RISIKO	SNI IEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO — TEKNIK PENILAIAN RISIKO	228/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI lama
18	SNI 1439:2021 KARTON GELOMBANG UNTUK KOTAK KARTON GELOMBANG	SNI 1439:2010 KARTON GELOMBANG DAN KOTAK KARTON GELOMBANG	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
19	SNI 6021:2021 KERTAS GLASIN	SNI 6021:2009 KERTAS GLASIN	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
20	SNI ISO 19110:2016 INFORMASI GEOGRAFIS-METODOLOGI PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI	SNI ISO 19110:2015 INFORMASI GEOGRAFIS-METODOLOGI PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
21	SNI ISO 3175-2:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN CARMEN - BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOOROETANA	SNI ISO 3175-2:2015 TEKSTIL- PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DANGARMEN - BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOOROETANA	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
22	SNI 7277-14:2021 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14: KESELAMATAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN	SNI 7277.14:2008 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14: KESELAMATAN KAPAL PERIKANAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
23	SNI 9025:2021 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN	SNI 8088:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN DAN SNI 8089:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN BEKUDARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
24	SNI 8087:2021 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL PERIKANAN	SNI 8087:2014 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
25	SNI 440:2021 KERTAS DAN KARTON - GRAMATUR	SNI 0440:2006 GRAMATUR KERTAS DAN KARTON	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2023
26	SNI 581:2021 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON	SNI 0581:2012 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
27	SNI 1303:2021 CARA UJI HOLOSELULOSA DALAM KAYU	SNI 01-1303-1989 CARA UJI KADAR HOLOSELULOSA	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
28	SNI 410:2021 CARA UJI LENGKUNG LOGAM	SNI 0410:2017 CARA UJI LENGKUNG LOGAM	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
29	SNI ISO 3175-1:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN	SNI ISO 3175-1:2011 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL. CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2022
30	SNI ISO 13935-1:2014 TEKSTIL - SIFAT KEKUATAN JAHITAN PADA KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - BAGIAN 1: PENENTUAN KEKUATAN MAKSIMUM PUTUS JAHITAN MENGGUNAKAN METODE PITA	SNI ISO 13935-1:2012 TEKSTIL - KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - CARA UJI KEKUATAN JAHITAN - BAGIAN 1: METODE PITA	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
31	SNI ISO 3071:2020 TEKSTIL - CARA UJI PH EKSTRAK CAIRAN	SNI ISO 3071:2015 TEKSTIL - CARA UJI PH EKSTRAK CAIRAN	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023
32	SNI ISO 7211-5:2020 TEKSTIL - METODE ANALISIS KONSTRUKSI ICAIN TENUN - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBILDARI KAIN	SNI ISO 7211-5:2017 TEKSTIL - KAIN TENUN - METODA ANALISA - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBIL DARI KAIN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2023
33	SNI ISO 811:2018 TEKSTIL - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK	SNI ISO 811:2013 TEKSTIL - KAIN - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023
34	SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF	SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAF		30 Juni 2024
35	SNI 2694:2021 SURIMI BEKU	SNI 2694:2013 SURIMI	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
36	SNI 3457:2021 UDANG KUPAS MENTAH BEKU	SNI 3457:2014 UDANG KUPAS MENTAH BEKU	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
37	SNI 2372-2:2021 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BERAT BERSIH DAN BERAT TUNTAS PADA HASIL PERIKANAN BEKU	SNI 2372.2:2011 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BOBOT TUNTAS PADA PRODUK PERIKANAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
38	SNI 2729:2021 IKAN SEGAR	SNI 2729:2013 IKAN SEGAR	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
39	SNI 4224:2021 DAGING RAJUNGAN MASAK DINGIN	SNI 4224:2015 DAGING RAJUNGAN REBUS DINGIN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
40	SNI 2332-6:2021 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT PADA HASIL PERIKANAN	SNI 2332.6:2015 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT CACING PADA PRODUK PERIKANAN	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
41	SNI 8263:2021 IKAN HIAS RASBORA {RASBORA SPP.} - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN	SNI 8263:2016 IKAN HIAS RASBORA [RASBORA SPP.] - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
42	SNI 7948:2021 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	SNI 7948:2013 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
43	SNI 7795:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH BERKAPAL	SNI 7795:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH CUMI (STICK HELD CAST NET)	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
44	SNI 7796:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT	SNI 7796:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
45	SNI 9026:2021 KAPAL PERIKANAN - PALKA IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU PADA KAPAL PENANGKAP IKAN	SNI 8090:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN SEGAR DAN SNI 8091:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN BEKU	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
46	SNI 680:2021 KLOSET JONGKOK KERAMIK	SNI 03-0680-1998 TANDAS JONGKOK JENIS VITORUS CINA	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
47	SNI 2802:2021 TEPUNG AGAR-AGAR MURNI	SNI 2802:2015 AGAR-AGAR TEPUNG	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
48	SNI 8391-1:2021 KARAGINAN MURNI - BAGIAN 1: KAPPA (K) KARAGINAN MURNI METODE PENJENDALAN KCL - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	SNI 8391-1:2017 KARAGINAN MURNI (REFINED CARRAGEENAN) - BAGIAN 1: KAPPA KARAGINAN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
49	SNI 180-1:2022 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) - BAGIAN 1: SYARAT MUTU	SNI 180:2021 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) DAN SNI 03-3988-1995 PENGUJIAN KEMAMPUAN PEMADAMAN DAN PENILAIAN ALAT PEMADAM API RINGAN		Akan dikonfirmasi kembali pada tgl 11 April 2022 ke lab uji BBLM

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
50	SNI IEC 62321-1:2013 PENENTUAN BAHAN TERTENTU ZAT DALAM PRODUK ELEKTROTEKNIK - BAGIAN 1: PENDAHULUAN DAN IKHTISAR	SNI IEC 62321:2015 PRODUK ELEKTROTEKNIK - PENENTUAN KADAR ENAM UNSUR YANG DIREGULASI (TIMBAL, AIR RAKSA, KADMIUM, KROMIUM HEKSAVALEN, BIFENIL POLIBROMINAT, ETER DIFENIL POLIBROMINAT)	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
51	SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF	SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAF	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
52	SNI 7700-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER)	SNI 7700.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: LAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
53	SNI 7700-3:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: GROWLER	SNI 7700.3:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: PULLET	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
54	SNI 7700-1:2021 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: PRESTARTER	SNI 7700.1:2011 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM F5AS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: STARTER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
55	SNI 7700-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN	SNI 7700.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
56	SNI 7700-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRELAYER	SNI 7700.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRALAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
57	SNI 7700-2:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM HAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: STARTER	SNI 7700.2:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: GROWER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
58	SNI 7652-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN	SNI 7652.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
59	SNI 7652-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER)	SNI 7652.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: LAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
60	SNI 7652-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER	SNI 7652.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
61	SNI 3907:2021 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER)	SNI 01- 3907-2006 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
62	SNI 3906:2021 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER)	SNI 01- 3906-2006 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
63	SNI 3905:2021 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER)	SNI 01-3905-2006 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
64	SNI 665:2021 Sabit - Syarat mutu dan metode uji	SNI 02-0665-1989 Sabit/arit	130/KEP/BSN/5/2022	30 Juni 2023
65	SNI 6349:2021 Tata cara penentuan ketebalan tanah zona perakaran prapenambangan	SNI 13-6349-2000 Penentuan ketebalan zona pengakaran pra-penambangan	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
66	SNI 7742:2021 Pengelolaan air asam tambang	SNI 7742:2011 Pengelolaan air asam tambang	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
67	SNI 6250:2021 Tata cara penentuan kualitas tanah untuk revegetasi di lahan terganggu pada kegiatan pertambangan	SNI 03-6250-2000 Tata cara penentuan kualitas tanah pada lahan bekas tambang untuk revegetasi	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
68	SNI 6597:2021 Uji karakterisasi batuan untuk penentuan potensi pembentukan air asam tambang	SNI 6597:2011 Uji statik pengidentifikasian sumber air asam tambang	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
69	SNI ISO 6710:2017 Wadah sekali pakai untuk penampungan spesimen darah vena manusia (ISO 6710:2017, IDT)	SNI ISO 6710:2010 Wadah sekali pakai penampung spesimen darah vena	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
70	SNI ISO 7886-1:2017 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 1: Alat suntik untuk penggunaan manual (ISO 7886-1:2017, IDT)	SNI 16-7010.1-2004 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 1: Untuk penggunaan manual	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
71	SNI ISO 8669-2:1996 Kantong penampung urin – Bagian 2: Persyaratan dan metode uji (ISO 8669-2:1996, IDT)	SNI 16-6359-2000 Kantong penampung urine - Persyaratan dan metode uji		Pencabutan SNI Lama
72	SNI ISO 7886-4:2018 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan penggunaan ulang (ISO 7886-4:2018, IDT)	SNI ISO 7886-4:2009 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan ulang	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
73	SNI ISO 10555-5:2013 Kateter intravaskular – Kateter steril dan sekali pakai – Bagian 5: Kateter perifer over-needle (ISO 10555-5:2013, IDT)	SNI ISO 10555-5:2010 Kateter intravaskular sekali pakai, steril - Bagian 5: Kateter perifer over-needle	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
74	SNI ISO 15747:2018 Wadah plastik untuk injeksi intravena (ISO 15747:2018, IDT)	SNI ISO 15747:2012 Wadah plastik untuk injeksi intravena	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
75	SNI ISO 23500-3:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait — Bagian 3: Air untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500-3:2019, IDT)	SNI ISO 13959:2010 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
76	SNI ISO 23500-5:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait — Bagian 5: Mutu cairan dialisis untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500-5:2019, IDT)	SNI ISO 11663:2011 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
77	SNI 6911:2022 Penanganan Bahan Peledak Komersial yang Aman pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi	SNI 13-6911-2002 Penanganan Bahan Peledak yang Aman di Indonesia - Pelaksanaan	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
78	SNI 7964:2022 Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors)	SNI 7964:2014 Prosedur Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
79	SNI 7188-7:2022 Kriteria Ekolabel - Bagian 7 : Kategori Produk dan Wadah Bioplastik yang Dapat Dikomposkan	SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai	229/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI Lama
80	SNI 2973:2022 Biskuit	SNI 2973:2018 Biskuit		akan dilakukan rapat lanjutan
81	SNI 6160:2022 Rumah Potong Hewan Unggas	SNI 01-6160-1999 Rumah Pemotongan Unggas	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
82	SNI 1972:2022 Metode Uji Slump beton Semen Hidraulis	SNI 1972:2008 Metode Uji Slumpbeton	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
83	SNI 4143:2022 Metode Uji Susut Linier Tanah	SNI 03-4143-1996 Metode Pengujian Susut Linier Tanah	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
84	SNI 8011:2022 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK	SNI 8011:2014 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK		31 Desember 2024
85	SNI 2938:2022 TEKSTIL - TOLERANSI DAN SPESIFIKASI BENANG TEKSTUR POLIESTER	SNI 08-2938-1992 BENANG TEKSTUR POLIESTER		30 Juni 2024
86	SNI ISO 13938-1:2019 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGEMBUNGAN METODE HIDROLIK	SNI ISO 13938-1:2010 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGEMBUNGAN METODE HIDROLIK		30 Juni 2024
87	SNI ISO 12947-2:2016 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - BAGIAN 2: CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI	SNI ISO 7888:2013 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI		30 Juni 2024

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
88	SNI ISO 105-A03:2019 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN	SNI ISO 105-A03 :2010 (EDISI 2017), TEKSTIL CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN		Pencabutan SNI Lama
89	SNI ISO 13938-2:2019 TEKSTIL-KEKUATAN JEBOL KAIN BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGEMBANGAN METODE PNEUMATIK	SNI ISO 13938-2:2011 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGEMBANGAN METODE PNEUMATIK		30 Juni 2024
90	SNI ISO13935-2:2014 TEKSTIL-KAIN DAN PRODUK TEKSTIL-CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU	SNI ISO13935-2:2012 TEKSTIL- KAIN DAN PRODUK TEKSTIL- CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU		30 Juni 2024
91	SNI 122:2022 KERAN AIR SUPLAI UNTUK KEPERLUAN DOMESTIK	SNI 03-0122-1998 KERAN AIR RUMAH TANGGA JENIS KATUP PINTU		31 Desember 2024
92	SNI 9043-1:2022 Pakan Buatan -Bagian 1:Udang Windu (Penaeus monodon, Fabricius1798)	SNI 02.2724-2002 Pakan Buatan untuk Udang Windu (Penaeus monodon)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
93	SNI 9043-2:2022 Pakan Buatan -Bagian 2:Udang Vaname (Litopenaeus vannamei,Boone1931)	SNI 7549:2009 Pakan Buatan Untuk Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
94	SNI 9043-4:2022 Pakan Buatan - Bagian 4:Ikan Lele (Clariasspp.)	SNI 01-4087-2006 Pakan Buatan untuk Ikan Lele Dumbo (Clariasgaripepinus) Pada Budidaya Intensif	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
95	SNI 9044-1:2022 Ikan Nila (Oreochromispp.)-Bagian 1:Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)	6495:2011 Produksi Ikan Nila (Oreochromis niloticus,Bleeker) Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
96	SNI 9044-2:2022 Ikan Nila (Oreochromispp.)- Bagian 2:Pembesaran Secara Semi-Intensif di Tambak	SNI 8006:2014 Produksi Pembesaran Ikan Nila Salin (Oreochromispp.) di Tambak	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
97	SNI 7775:2022 Produksi Ikan Hias Koi (Cyprinus nirofiiscus, Linnaeus 1758)	SNI 7775:2013 Produksi Ikan hias Koi (Cyprinus carpio)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
98	SNI 8227:2022 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	SNI 8227:2015 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2024
99	SNI 7627:2022 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan	SNI 7627:2014 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
100	SNI 563:2021 METODE UJI STANDAR UNTUK ABU TOTAL PADA KULIT	SNI 06-0563-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR ABU		30 Juni 2024
101	SNI ISO 17229:2016 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN ABSORPSI UAP AIR	SNI ISO 17229:2013 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN PENYERAPAN UAP AIR		31 Desember 2023
102	SNI ISO 4045:2018 KULIT- PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH DAN PERBEDAAN NILAI	SNI ISO 4045:2011 KULIT - PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH SNI 06- 0646-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI pH		30 Juni 2024
103	SNI ISO 5403-2:2011 KULIT - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL - BAGIAN 2: KOMPRESI ULANG BERSUDUT (MAESER)	SNI ISO 5403:2012 KULIT - METODE UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL		31 Desember 2023
104	SNI 7053:2022 MOBIL POMPA PEMADAM KEBAKARAN	SNI 09-7053-2004 KENDARAAN DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN - POMPA	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2022
105	SNI 2202:2022 SABUK AMPELAS	SNI 15-2202-1991 SABUK PENGAMPELAS - PENANDAAN, DIMENSI DAN TOLERANSI	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2023
106	SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT) - METODE REFERENSI	SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) - METODE REFERENSI		Pencabutan

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
107	SNI 80:2022 CAIRAN KELANTANG	SNI 06-0080-1987 MUTU DAN CARA UJI BLEACHING LIQUOR	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
108	SNI 1842:2022 PEMBERSIH LANTAI CAIR	SNI 1842:2019 PEMBERSIH LANTAI	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2023
109	SNI 3721:2022 SERBUK KELANTANG	SNI 06-3721-1995 SERBUK KELANTANG	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
110	SNI 4904:2022 SERBUK PEMBERSIH PERMUKAAN KERAS	06-4904-1998 SERBUK PEMBERSIH (PENGGOSOK) PERMUKAAN KERAS	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
111	SNI 7381:2022 MINYAK KELAPA VIRGIN (VIRGIN COCONUT OIL)	SNI 7381:2008 MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2024
112	SNI 2970:2022 SUSU BUBUK	SNI 2970:2015 SUSU BUBUK		31 Desember 2024
113	SNI 2971:2022 SUSU KENTAL MANIS	SNI 2971:2011 SUSU KENTAL MANIS		31 Desember 2024
114	SNI 3719:2022 MINUMAN SARI BUAH	SNI 3719:2014 MINUMAN SARI BUAH		30 Juni 2024
115	SNI 7841:2022 PUREE BUAH	SNI 7841:2013 PUREE BUAH	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2024
116	SNI 2979:2022 SELAI KACANG	SNI 01-2979-1992 MENTEGA KACANG		31 Desember 2024
117	SNI ISO 11132:2021 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI PANDUAN PENGUKURAN KINERJA PANEL SENSORI DESKRIPTIF KUANTITATIF	SNI ISO 11132:2017 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI - PANDUAN PEMANTAUAN KINERJA PANEL SENSORI KUANTITATIF	354/KEP/BSN/9/2022	Pencabutan SNI lama
118	SNI 4275:2022 SAUS TIRAM	SNI 01-4275-1996 SAUS TIRAM		31 Desember 2024

LAMPIRAN III

PROGRES PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2022

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
1.	Kualifikasi dan sertifikasi personil UTR (Uji Tak Rusak) Level I dan II	SNI ISO 9712:2014	Uji tak rusak - Kualifikasi dan sertifikasi personil UTR (ISO 9712:2012, IDT)	2022	BATAN/BRIN	-
2.	Profil metadata spasial Indonesia	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014, MOD)	2022	BIG	Pembahasan progress penerapan SNI 8843-1:2019 secara wajib (18 Oktober 2022)
3.	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	Pembahasan progress PNRT (21 Desember 2022)
4.	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi beriodium	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
5.	Kaca Isolasi - Kaca untuk Bangunan	SNI ISO 20492-4:2014 SNI ISO 20492-3:2014 SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel tepi (ISO 20492-4: 2010, IDT) Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran gas (ISO 20492-3:2010, IDT) Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi 24-26 Agustus 2022 untuk: a) SNI ISO20492-2:2014 Kaca untuk bangunan – Kaca isolasi – Bagian 2: Uji pengkabutan kimia; b) SNI 8801:2019 Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin; dan/atau c) SNI 8822:2019 Kaca Pengaman untuk Sarana

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
		SNI ISO 20492-1:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji iklim (ISO 20492-1: 2008, IDT)			Perkeretaapian.
6.	Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	SNI 809:2021	Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	2022	Kementerian Perindustrian	-
7.	Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	SNI 600:2021	Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	2022	Kementerian Perindustrian	-
8.	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
9.	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	-
10.	Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna	SNI 66:2019	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna)	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
11.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	-
12.	Kompur Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	SNI 8660:2018	Kompur Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	2022	Kementerian Perindustrian	Evaluasi dan pembahasan rencana revisi pemberlakuan (15 Juni 2022)

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
13.	Kompore Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial	SNI 7613:2019	Kompore Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial	2022	Kementerian Perindustrian	-
14.	Rangka Atap Baja Ringan	SNI 8399:2017	Profil rangka baja ringan	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
		SNI 8399:2017/Amd1:2019	Profil rangka baja ringan			
15.	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	-
16.	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
17.	Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi	SNI 0141:2009/Amd2:2015	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen 2	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
18.	AC	SNI IEC 60335-2-40-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	-
19.	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	2022	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
20.	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci	2022	Kementerian Perindustrian	-
21.	Showcase	SNI IEC 60335-2-89:2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
22.	Baterai Primer	SNI IEC 60086-2-2015	Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2011, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
23.	Pompa Submersible	SNI/IEC 60335-2-41:2010 *	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa	2022	Kementerian Perindustrian	-
24.	Powerbank	SNI 8785:2019	Bank daya (Power Bank) Ion Litium – Bagian 1: Persyaratan umum keselamatan	2022	Kementerian Perindustrian	-

LAMPIRAN IV

PENETAPAN PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2023

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
1.	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	-
2.	Krimer Nabati Bubuk	SNI 4444:2018	Krimer Nabati Bubuk	2023	Kementerian Perindustrian	-
3.	Gula Kristal Rafinasi	SNI 3140-2:2018	Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
4.	Kertas Pembentuk Rokok	SNI 3755:2019	Kertas Pembentuk Rokok	2023	Kementerian Perindustrian	-
5.	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi Beriodium	2020	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
6.	Bahan Baku Plastik	SNI 8432:2017	Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif	2023	Kementerian Perindustrian	-
7.		SNI 8887:2020	Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas	2023	Kementerian Perindustrian	-
8.		SNI 7808:2012	Bijih plastik polietilena	2023	Kementerian Perindustrian	-
9.		SNI 0594:2011	Polipropilena	2023	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
10.		SNI 59:2017	Resin Polivinil Klorida (PVC)	2023	Kementerian Perindustrian	-
11.		SNI 7593:2010	Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum	2023	Kementerian Perindustrian	-
12.	Tanki air silinder vertikal	SNI 7276:2020	Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
13.	Minyak lumas untuk kendaraan bermotor	SNI 7069-1:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
14.		SNI 7069-2:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
15.		SNI 7069-3:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
16.		SNI 7069-4:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
17.		SNI 7069-5:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
18.		SNI 7069-6:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 6: Minyak lumas roda gigi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
			transmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor			
19.		SNI 7069-7:2021	Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak Lumas Transmisi Otomatis	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
20.	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	2022	Kementerian Perindustrian	-
21.		8421:2017/Amd.1 2020	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1	2022	Kementerian Perindustrian	-
22.	Kaca untuk Bangunan - Kaca Isolasi	SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT).	2022	Kementerian Perindustrian	-
23.		SNI 8801:2019	Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin	2023	Kementerian Perindustrian	-
24.		SNI 8822:2019	Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian	2023	Kementerian Perindustrian	-
25.	Aki	SNI 0038:2009	Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2023	Kementerian Perindustrian	-
26.		SNI 4326:2013	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L	2023	Kementerian Perindustrian	-
27.	Kompore	SNI 8660:2018	Kompore Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
28.		SNI 7613:2019	Kompore Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
29.	Baja lembaran lapis seng yang diberi	SNI 66:2019	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna)	2020	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
	lapisan cat berwarna					
30.	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
31.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium- Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
32.	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	-
33.	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
34.	Alat Pemadam Api Portabel	SNI 180:2021 dan revisinya	Alat Pemadam Api Portabel (APAP)	2023	Kementerian Perindustrian	-
35.	Katup Tabung LPG	SNI 1591:2016	Katup Tabung LPG	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
36.	Pompa air sentrifugal untuk irigasi	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan metode uji	2020	Kementerian Perindustrian	-
37.	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa -	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
			Keselamatan - Bagian 2-24. Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es			
38.	AC	SNI IEC 60335-2-40:2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
39.	Mesin cuci	SNI IEC 60335-2-7:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
40.	Showcase	SNI IEC 60335-2-89: 2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
41.	Baterai	SNI IEC 60086-2:2015	Baterai primer – Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2015, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
42.	Power Bank	SNI 8785:2019	Bank Daya (Power Bank) Ion Litium - Bagian 1 : Persyaratan Umum Keselamatan	2022	Kementerian Perindustrian	-
43.	Mainan	SNI 8580—1:2018 ISO 8124—1: 2014	Keamanan mainan — Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 81241.2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
44.		SNI 8580-2:2018 ISO 81242: 2014	Keamanan mainan — Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
45.		SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3. 2010	Keamanan mainan — Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124- 3:2010/ Amd.1:2014, IDT	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
46.		SNI 8580-4:2018 ISO 8124-4: 2014	Keamanan mainan — Bapian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ISO 8124- 4:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
47.		SNI 8579:2018 IEC 62115:2017	Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115: 2017, IDT, Eng)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
48.		SNI 8578:2018	Persyaratan mutu dan metode uji kandungan ftalat dalam produk mainan anak berbahan plastik	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
49.		Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas	SNI 9040:2021	Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas- Persyaratan	2023	Kementerian ESDM
50.	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	SNI 8222:2016	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
51.	Tuna dalam kemasan kaleng	SNI 8223:2016	Tuna dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
52.	Metadata	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	2022	Badan Informasi dan Geospasial	Dengan Pemenuhan Acuan Normatif: - SNI ISO 19115-2:2019 (- SNI ISO 19115-3:2016 - SNI ISO 19157:2015 - SNI ISO 19157-2: 2016 (

LAMPIRAN V

TABEL REKOMENDASI PADA PERUNDINGAN/KESEPAKATAN INTERNASIONAL BIDANG SPK

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
1	Bilateral	IACEPA	Implementasi	Proposal Australia kepada Indonesia terkait Mekanisme dan Kerjasama program tindaklanjut IACEPA Tahun 2021	<p>BSN memberikan rekomendasi kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait usulan Kerjasama dan mekanisme di bidang Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai tindak lanjut IA CEPA, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama untuk menjajaki peluang dukungan kendaraan listrik melalui standar dan penilaian kesesuaian, fokus pada pengembangan keahlian pertambangan litium Australia dan pengembangan baterai lithium-ion teknologi. 2. mengusulkan program kerja Bersama untuk sektor potensial (tekstil, makanan, dan industry maju), dimana masing-masing K/L memiliki peran, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - BSN: Melakukan fasilitasi penerapan dan sertifikasi - FTA Center: menyediakan pasar dan bina jalur perdagangan - LPK: melakukan PK dan koodinasi penyiapan persyaratan teknis - Pemda: menentukan lokus dan memfasiliasi infrastruktur daerah
2		IEUCEPA	On-Going negotiation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Draft text TBT dan Annex pada Chapter IEUCEPA 2. Annex List of Organization 3. Supplier Declaration 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Annex List of Organization – BSN menyampaikan posisi Indonesia untuk tidak memasukkan UNECE dan ILO dalam daftar organisasi pengembang standar yang disetujui, dengan pertimbangan bahwa Standar dari kedua organisasi tersebut tidak masuk dalam lingkup TBT. 2. Annex Supplier Declaration - BSN merekomendasikan untuk saat ini pengaturan terhadap SDoC tetap belum bisa dimasukkan dalam draft teks TBT IEU Cepa dengan

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
				of Conformity (SDoC) 3. Annex Motor vehicle	<p>pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Regulasi SPK yang ada saat ini (UU 20 tahun 2014 dan PP 34 Tahun 2018) belum mengatur penerapan SDoC secara eksplisit o Regulasi berbasis standar untuk produk high risk tetap menggunakan pihak ketiga dan belum ada yang menerapkan SDoC. Berbeda dengan regulasi EU, penerapan SDoC bisa untuk beberapa produk yang high risk <p>3. BSN menyampaikan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN MRA automotive sebagai best practice yg berfungsi menjadi pertimbangan menentukan posisi Indonesia menjadi anggota WP 29, mengingat berdasarkan kajian Bersama masih banyak kesulitan untuk menjadi anggota WP 29 (tidak siap menjadi pasar bagi product-product EU)</p>
3		IUAECEPA	On-Going negotiation	Penyelesaian Draft text TBT dalam Working Group Trade in Goods	BSN merekomendasikan kepada Kementerian Perdagangan untuk TBT/STRACAP tetap pada bentuk article di bawah Chapter Trade in Goods dan bukan chapter tersendiri dengan pertimbangan hubungan Indonesia dengan UAE di forum TBT WTO tidak terlalu banyak permasalahan sehingga kesepakatan dalam draft teks TBT Indonesia UAE Cepa bisa mengacu ke artikel-artikel yang ada di TBT WTO Agreement.
4		IETO TETO Indonesia - Taiwan	On-Going negotiation	Pembahasan terkait article Intellectual Property Right (IPR) dalam MoU on Standardization and Conformity Assessment Cooperation	BSN merekomendasikan kepada Direktorat Perundingan Bilateral Kemendag agar menyetujui Article Intellectual Property Rights dalam MoU on Standardization and Conformity Assessment pada Joint Committee on Trade and Investment IETO-TETO.

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
5	Regional	ACCSQ Plenary	On-Going negotiation	Circular 32 on Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) by Viet Nam	<p>BSN memberikan rekomendasi untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi menyeluruh terhadap dossier obat yang diserahkan untuk registrasi sesuai dengan ACTD, dimana aspek mutu, khasiat dan keamanan suatu produk dapat dievaluasi melalui dossier sesuai ACTD. 2. Penyamaan persepsi bahwa CPP merupakan dokumen administratif yang menginformasikan suatu produk terdaftar di Negara asal, dimana untuk melihat apakah suatu produk sudah terdaftar atau belum, dapat melakukan pengecekan pada web site resmi NRA. 3. Penyampaian Inquiry terhadap notifikasi Circular 32/2018/TT-BYT kepada TBT WTO dengan substansi: <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Rancangan dokumen regulasi yang dinotifikasikan oleh Viet Nam, termasuk ketentuan transisi (Transitional Provision) dalam bahasa Inggris. • Klarifikasi pernyataan VietNam atas informasi tentang belum adanya AMS yang berdampak negatif dari penerapan regulasi tersebut.
6		ACFTA	Implementasi	Further Liberalisation of Trade in Goods and Possible Areas of Cooperation between ASEAN and China under the ACFTA Upgrading Protocol	<p>BSN memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usulan terkait transparency dan cooperation dalam chapter STRACAP/TBT dapat disepakati mengingat pembahasan sejenis telah umum dalam chapter STRACAP di ASEAN FTA lainnya. 2. Usulan mutual understanding bidang STRACAP antara ASEAN dan China untuk memfasilitasi perdagangan melalui pengakuan atas hasil uji laboratorium dan sertifikat kesesuaian produk oleh kedua belah pihak juga harus dapat diimplementasikan pada beberapa level standar (tingkat daerah dan nasional). 3. Masukan bahwa dalam 5 kategori produk dalam dialogue partner ACCSQ dengan ACFTA SC-STRACAP, yaitu Prepared Foodstuff, Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicine, Health

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
					Suplement), Electrical and Electronic Equipment, Wood-Based, Automotives dan potensi area lain yang masih dalam peninjauan antara ASEAN dan China, dapat menjadi pintu liberalisasi dalam area STRACAP yang cukup terbuka diantara kedua pihak
7		RCEP	Ratifikasi	Proses pengesahan RCEP melalui Adopsi ke dalam instrumen hukum nasional	<p>BSN memberikan masukan dalam rencana aksi persiapan implementasi perjanjian RCEP, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan awareness para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal 8. Melakukan sosialisasi dan diseminasi untuk identifikasi peluang positif dalam pemanfaatan perjanjian dengan tujuan meningkatkan ekspor produk unggulan yang memenuhi standar (SNI harmonis) 9. Melakukan identifikasi SNI yang harmonis dengan Standar Internasional dan roadmap arah adopsi dengan SDO Internasional 10. Melakukan pemetaan kesiapan Skema SNI yang sudah/belum tersedia untuk SNI wajib maupun sukarela 11. Melakukan kajian kesiapan keberterimaan conformity assessment result baik untuk scope test report atau certification untuk sektor produk prioritas dengan UMKM sebagai target utama 12. Mengembangkan kerjasama dengan SDO dan NSB yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan pengembangan Standar di tingkat Regional maupun Internasional 13. Mengembangkan kerja sama dengan K/L pembina sektor untuk mendukung kemampuan sektor produk nasional dalam pemenuhan standar untuk tujuan Capacity Building, seperti:

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
					<ul style="list-style-type: none"> - memusatkan Pelatihan kompetensi (bidang standar dan penilaian kesesuaian) yang berfokus pada produk prioritas nasional dan mengutamakan UMKM - melakukan pelatihan teknis pada sektor-sektor produk yang berpotensi untuk di ekspor
8		AANZFTA	Implementasi	<p>Upgrading AANZFTA framework agreement</p> <p>Proposed inclusion of 60-day timeline specified in the RCEP STRACAP Chapter to the AANZFTA STRACAP Chapter</p>	<p>BSN merekomendasikan kepada delegasi Indonesia terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu 60 hari yang terdapat dalam Bab STRACAP memberi keuntungan terutama peluang bagi Indonesia untuk memperoleh transparansi. 2. Ketentuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), memerlukan penelaahan lebih dalam dengan ketentuan ASEAN NTMs telah disepakati AMS untuk tujuan konsusrensi
9	Multi-lateral	WTO TPR	Implementasi	Penyelenggaraan TPR anggota WTO Periode Tahun 2021	BSN memberikan masukan / Inquiry pada masing-masing dokumen Secretariat Report TPR negara anggota WTO yang sedang berjalan, antara lain: Argentina, Turki, Republik Rakyat Tiongkok, & Vietnam sebagai evaluasi terhadap praktek pemenuhan TBT WTO Agreement (standar, regulasi teknis, penilaian kesesuaian dan mekanisme transparansi) agar tidak merugikan kepentingan nasional.
10		WTO TFA	Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja KNFP 2. Media Data, Informasi dan Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BSN mengusulkan Keterlibatan perwakilan masing-masing K/L dalam menangani isu sectoral sebagai anggota Sekretariat KNFP yang sedang disusun, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan dapat dilakukan secara periodik 2. BSN memberikan sambutan positif atas rencana pembentukan website KNFP untuk menampung Inquiry yang masuk ke Indonesia sebagai program prioritas KNFP Tahun 2022

No	Forum	Nama Forum	Status	Isu	Rekomendasi
					3. BSN menyampaikan masukan terhadap Indonesia's Trade and Trade-Related Measures (Periode of mid-October 2020 until mid-May 2021), bahwa Kebijakan BSN akan memiliki dampak bagi kebijakan K/L/LPK/stakeholder lain yang berkenaan dengan dukungan pemenuhan infrastruktur mutu nasional, namun tidak bersinggungan langsung konsumen/masyarakat.
11		UNFSS	Kajian teknis	Pembentukan platform multi-stakeholder untuk VSS di tingkat nasional (NP-VSS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. BSN merekomendasikan untuk melakukan harmonisasi terhadap pandangan Voluntary Sustainability Standards (VSS) sebagai aturan khusus yang menjamin bahwa produk yang dibeli konsumen tidak membahayakan lingkungan dan orang yang memproduksinya 2. BSN memberikan usulan proposal Kajian Pembentukan National Platform VSS (NP VSS) dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian yang seklaiigus dapat menjadi tindaklanjut Perjanjian IEFTACEPA dan program UNFSS.



DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL | 2023